A.Zaini Tamin AR dkk

POLITIK PENDIDIKAN

(KONSEP DAN PRAKTIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA)

Editor
Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

POLITIK PENDIDIKAN
(Konsep dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia)

Penulis :
A. Zaini Tamin AR dkk

Editor
Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag

POLITIK PENDIDIKAN
(Konsep dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia)

Penulis : A. Zaini Tamin AR dkk
Editor : Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag

Vi + 128 Hlmn

© 2018, Dwiputra Pustaka Jaya

Diterbitkan oleh:
CV. Dwiputra Pustaka Jaya
Star Safira Cluster Nizar Mansion E4 no. 14 Taman - Sidoarjo
Telp : 08558414756
Email : dwiputra.pustaka@gmail.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-6604-39-2

Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan. Kalimat inilah yang sering ditegaskan Paulo Freire. Menurutnya, segala kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi ekspektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang baik. Dengan "tesis" Freire tersebut, maka dapat kita dapat mengasumsikan bahwa negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya baik, kinerja pendidikannya pun juga baik.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah politik pendidikan di Indonesia? Pertanyaan yang kera dilontarkan, namun sulit menemukan jawaban.Realitasnya memang pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari *knowledge and power* (pengetahuan dan kuasa). Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan kuasa yang diemban oleh pemerintah untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban Indonesia. Dengan kata lain,transfer pengetahuan, nilai dan kebudayaanmenjadi tanggung jawab pemerintah yang harus direalisasikan.

Dalam perjalanan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan disegala bidang, termasuk pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena perjuangan kemerdekaan belum selesai dan masih terjadi instabilitas, maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengherankan bila selama orde lama sering terjadi pergantian menteri.

Perubahan sistem pemerintahan ini berimplikasi terhadap dinamika pendidikan di Indonesia,karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Tujuannya tentu untuk menciptakan sistem pendidikan emansipatoris yang menopang kemajuan sumber daya manusia di Republik ini. Maka, diperlukan adanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pendidikan.

Oleh karena itu, buku yang ada di hadapan pembaca ini menjadi penting untuk dibaca dalam memahami politik pendidikan Islam di Indonesia.Seberapa besar peran pemerintah sebagai penentu kebijakan, seberapa jauh partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta bagaimana tanggung jawab para pelaku pendidikan akan dikupas dalam bagian-bagian buku ini.

Surabaya, 09 Maret 2018

Editor

Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar..... iii
Daftar Isi..... v

PENDIDIKAN VS DUNIA KERJA
Zaini Tamin AR..... *1*

KEBIJAKAN *FULL DAY SCHOOL* DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ANAK DIDIK
Nia Indah Purnamasari..... *25*

HOMESCHOOLING : Pendidikan Alternatif di Era Digital
Ika Agustin Widyawati *51*

KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 : Kurikulum Tematik-Integratif Untuk Membangun Karakter Peserta Didik
Mo'tasim..... *65*

GENDER SALAM REALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA
Zainal Alim dan Anif Nur Chasanah..... *91*

SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU
Abdullah *101*

NEGARA DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Moh. Ismail dan Juli Amalia Nasucha..... *109*

DAFTAR PUSTAKA 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDIDIKAN VS DUNIA KERJA

Oleh:
Zaini Tamin AR

Pendidikan adalah faktor penting bagi masa depan suatu bangsa. Pendidikan merupakan kunci untuk menapaki masa depan. Dengan menempuh pendidikan, diharapkan seseorang akan mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar ketrampilan untuk mencari nafkahnya. Selama ini kita tahu proses belajar atau yang sering kita sebut pendidikan telah kita dapat di sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Sekolah menjadi penting, artinya melalui sekolah kita mendapat pendidikan yang menentukan arah kehidupan kita dalam menapaki masa depan terutama dalam mencari sebuah pekerjaan. Yang menjadi masalah adalah seberapa penting pendidikan membantu kita di dalam dunia kerja.

Aplikasi umum konsep efisiensi eksternal sistem pendidikan adalah apa yang disebut relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Di antara banyak jenis kebutuhan pembangunan itu, relevansi pendidikan sering dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja terdidik. Tema peningkatan relevansi ini terus digunakan dari repelita ke repelita sebagai suatu hal yang melekat dalam pembangunan sektor pendidikan. Namun, masih diperlukan jabaran yang lebih jelas tentang tema relevansi ini agar dapat mengurangi ketidakpastian sehingga istilah relevansi pendidikan ini tidak muncul menjadi hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah retoris. Melalui penjelasan dan penjabaran secara operasional diharapkan agar relevansi dapat dijadikan tema yang lebih bermakna. Terlepas dari kelemahan yang ada, salah satu pendekatan untuk menempatkan konsep relevansi dalam dunia nyata, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI 1993-1998, Wardiman Djojonegoro mengenalkan sebuah konsep *link and match* (keterkaitan dan keselarasan) dalam rangka menempatkan tema relevansi selangkah lebih jelas.

Keterkaitan menggambar hubungan yang erat antara program-program pendidikan dan kebutuhan pasar. Pasar, dalam suatu prespektif yang luas adalah sejajar dengan apa yang disebut *educational constituency*, yaitu pihak-pihak yang memakai, menikmati jasa, atau berkepetingan dengan system pendidikan.

Keselarasan menggambarkan bahwa program pendidikan yang sudah terkait dengan berbagai kepentingan tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dari konstituensi pendidikan. Pendidikan yang sudah sepadan dengan kebutuhan lapangan kerja – sebagai salah satu bentuk konstituensi pendidikan – akan terlihat dari kemampuannya untuk menghasilkan tenaga terdidik yang sesuai dengan kebutuhan, baik menurut jumlah, mutu, maupun sebarannya.

A. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu yang universal dan berlang-sung terus ta terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dan dalam latar sosial- kebudayaan setiap masyarakat tertentu.[1]

Menurut Hoogeveld, pendidikan adalah membantu anak supaya cukup cakap dalam menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Sementara, menurut SA. Bratanata, pendidikan merupakan usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan pendidikan sebagai penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya.[2]

Jadi, dari pendapat para tokoh pendidikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan itu ada berbagai jenis, yaitu :

1. Menurut tingkat dan sistem persekolahan

   Pada saat ini jenis dan tingkat persekolahan di negara kita dari Pra sekolah sampai Perguruan Tinggi, ada :

   1. Tingkat Pra Sekolah
   2. Tingkat SD
   3. Tingkat SMP

[1] Umar Tirtarahardja & La Sasula, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 82.

[2] Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tingkat SMA, dibedakan menjadi 2 yaitu, SMA umum dan SMK
5. Tingkat Perguruan Tinggi, dibedakan berdasarkan jalur gelar (S-1, S-2, S-3) dan non gelar (D-1, D-2, dan D-3)

2. Menurut tempat berlangsungnya pendidikan
   Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan menurut tempatnya dibedakan menjadi 3 yaitu :
   1. Pendidikan didalam keluarga
   2. Pendidikan didalam sekolah
   3. Pendidikan didalam masyarakat
3. Menurut sifatnya pendidikan
   Pendidikan menurut sifatnya ada 2, di antaranya : [3]
   1. Pendidikan Formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah.
   2. Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang didapatkan manusia dari realitas sosial. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, atau organisasi.

Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifat yang sangat kompleks. Karena sifat yang kompleks itu, maka tidak ada batasan yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Diantara beberapa batasan yang dikemukakan para ahli berdasarkan fungsinya adalah:

[3] Ibid., 95-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi
   Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Dikatakan sistematis karna berlangsung melalui tahap-tahap yang berkesinambungan dan sistemik karena berlangsung dalam semua sitasi kondisi, lingkungan dan saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat).
2. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara
   Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.
3. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja
   Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.[4]

GBHN 1988 memberikan batasan mengenai pendidikan nasional, yakni pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta UUD 1945 yang mengarahkan pada peningkatan kecerdasan serta harkat serta martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan

[4] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dengan menempuh pendidikan, diharapkan seseorang akan mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar ketrampilan untuk mencari nafkahnya. Bekal dasar untuk bekerja tidak lain adalah pendidikan. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja, yaitu bagaimana menyiapkan keterampilan yang diperlukan mereka.[5] Kemajuan pembangunan menuntut pemahaman dan penerapan teknologi yang semakin canggih, sehingga menimbulkan tuntutan penguasaan keterampilan yang lebih tinggi. Kemajuan pembangunan di masa depan menuntut pembukaan lapangan kerja yang berorientasi pada penguasaan yang lebih tinggi. Pemberian keterampilan kepada calon-calon tenaga kerja di masa depan harus diper-siapkan sejak sekarang untuk menyongsong berlangsung-nya pembangunan di masa depan.[6]

Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Bekerja menjadi penopang hidup seseorang dan keluarga sehingga tidak bergantung dan mengganggu orang lain. Melalui kegiatan bekerja seseorang mendapatkan kepuasan bukan saja karena mendapat imbalan melainkan juga karena seseorang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain (jasa ataupun benda), bergaul, berkreasi, dan

[5] Umar Tirtarahardja dan La Sula, *Pengantar pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 35-36.

[6] Boediono, *Pendidikan Dan Perubahan Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersibuk diri. Kebenaran hal tersebut menjadi jelas bila kita melihat hal yang sebaliknya, yaitu menganggur adalah musuh kehidupan.

B. Fungsi Pendidikan dan Jenis Pendidikan

Dalam merinci fungsi, tentu akan mencakup deskripsi cita-cita yang diinginkan oleh peserta didik. Cita-cita itu adalah bagian yang penting dalam fungsi sistem yang jelas. Paling sedikit ada empat fungsi yang jelas dalam suatu masyarakat. Pertama, harus menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yaitu pendidikan dibuat untuk mengembangkan dalam diri anak-anak keyakinan, kebiasaan berfikir, dan bertindak yang dianggap perlu dan diharapakan dalam masyarakat. Kedua, pendidikan harus mempertahankan solidaritas sosial dengan mengembangkan dalam anak-anak rasa ikut memiliki bersama dengan keterikatan dengan cara hidupnya seperti yang mereka pahami. Ketiga, pendidikan harus menyampaikan pengetahuan yang meliputi warisan sosial. Keempat, pendidikan juga diharapkan mengembangkan pengetahuan baru.[7]

Dalam dunia pendidikan, jika ditinjau dari sebuah sistem, pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Pendidikan prajabatan *(preservice education)*
   Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu seperti STM tiga tahun, diploma III atematika tiga tahun, ataupun strata I

[7] D. R. Swift, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bhratara 1989), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurusan matematika empat tahun untuk dibekali menjadi pekerja di bidang teknik guru matematika pada SMP ataupun guru matematika pada SLTA.

2. Pendidikan dalam jabatan *(inservice education)*
   Pendidikan dalam jabatan bermaksud untuk memberikan bekal tambahan kepada orang-orang yang telah bekerja dalam penataran, kursus-kursus, dan lain-lain.[8] Tenggang waktunya sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan, serempak dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat, khususnya dunia kerja yang semakin hari semakin berkembang dan semakin bervariasi. Sehubungan dengan itu, terjadi pergeseran cara memandang kedua macam pendidikan tersebut.

C. Hiruk Pikuk Sistem Pendidikan Nasional

Dewasa ini pendidikan lazimnya dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat antisipatoris menyongsong perkembangan-perkembangan yang diperhitungkan akan terjadi di masa depan. Postur antisipasi ini ditentukan oleh persepsi masyarakat berpendidikan terhadap kecenderungan-kecenderungan yang ada, yang ditarik secara inferensial dari fakta-fakta yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kecenderungan yang terlihat dengan jelas dinamika kehidupan manusia dewasa ini ialah perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh usaha-usaha umat manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung kian lama kian cepat, jumlah penemuan yang dihasilkan

[8] Tirtarahardja dan La Sasula, *Pengantar Pendidikan*, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertahun diberbagai bidang pengetahuan makin lama makin meningkat.[9]

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Setiap pembangunan selalu diupayakan agar seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru yang sebagiannya tidak dapat diramalkan sebelumnya. Masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan sangatlah luas, di antaranya berupa sifat sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri, dan usaha pendidikan harus menyelesaikan masalah sosial di masa kini dan yang akan datang.

Sebagai sebuah sistem, pendidikan tidak dapat terlepas dari realitas sosial masyarakat. Sebab realitas sosial adalah salah satu objek pendidikan yang harus dikaji dan menjadi diskursus penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, cita-cita nasional harus selaras dengan pembangunan sistem pendidikan, utamanya dalam hal kurikulumnya. Relasi antara pendidikan dengan realitas sosial dalam masyarakat menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga permasalahan internal sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan internal dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri.

Pendidikan nasional saat ini menghadapi problem yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, yaitu:

[9] Mochtar Buchori, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerataan Pendidikan

   Luasnya negara ini menjadi keunggulan sekaligus masalah apabila kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan belum menyentuh keseluruhan aspek nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerataan dalam bidang pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan bertahap dan kontinyu. Sebab setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan yang berkualitas, guna menopang pembangunan nasional. Pemerataan pendidikan terjadi karena sistem pendidikan belum menyeluruh memfasilitasi warga negara untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana dimanatkan Undang-undang Dasar 1945.

   Ada beberapa opsi penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia: *Pertama*, cara inovatif. Cara ini dilakukan melalui inovasi-inovasi di dunia pendidikan antara lain: (1) Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru) atau *Inpacts System (Instruktional Management by Parent, Community and Teacher)*; (2) Sistem Guru Kunjung; (3) SD kecil pada daerah terpencil; (4) SMP Terbuka (ISOSA – *In School Out off School Approach);* (5) Belajar Jarak Jauh, seperti Universitas Terbuka; (6) Kejar Paket A dan B;. *Kedua*, cara konvensional antara lain: (1) Menggunakan *double shift* atau sistem bergantian pagi dan sore di sebuah lembaga pendidikan; (2) Membangun gedung sekolah seperti ruangan belajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mutu Pendidikan

Tolak ukur perkembangan sumber daya manusia di suatu negara bergantung pada kualitas pendidikannya. Apabila pendidikan belum mencapai tujuannya, maka kualitas atau mutu pendidikan masih perlu diperbaiki. Identifikasi kualitas *output* pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagai produsen manusia terdidik melalui sistem sertifikasi. Berikutnya, jika *output* pendidikan tersebut masuk dunia kerja, penilaian dilakukan oleh *stakeholder* melalui tes *performance*.

Jadi, mutu pendidikan dapat diidentifikasi melalui kualitas *output*nya. Hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, maka sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga masyarakat sekitar.[10]

Pembangunan sarana pendidikan lanjutan tingkat pertama dan atas sejak awal pembangunan jangka panjang kedua, seperti gedung sekolah, guru dan

[10] Tirtarahardja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, 225-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas pendidikan lainnya merupakan hal mendesak yang harus ditanggulangi. Dengan demikian, arah pembangunan pendidikan akan segera bergeser dari perluasan pendidikan dasar menjadi perluasan pendidikan lanjutan pada awal kurun waktu, dan mulai bergeser kependidikan tinggi pada akhir kurun waktu pembangunan jangka panjang. Upaya yang lebih mengarah pada penyempurnaan sarana dan suasana belajar di sekolah, serta peningkatan mutu pendidikan akan merupakan tantangan yang semakin menentukan mutu pendidikan. Aliran penduduk yang diperkirakan terus meningkat dari desa ke kota akan menambah rumit masalah keseimbangan dalam penyegaran penduduk, dan akibatnya akan menciptakan kesenjangan dalam mutu pendidikan tersebut akan menjadi tantangan yang semakin menarik untuk ditanggulangi di masa depan.[11]

Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu. Di dalam Tap MPR RI 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika. Umumnya kondisi mutu pendidikan diseluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah pedesaan, utamanya di

[11] Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan.

3. Efisiensi Pendidikan

   Efisiensi pendidikan menitikberatkan pada sejauh mana sistem pendidikan dapat memfungsikan sumber daya yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pendidikan. Apabila penggunaannya tepat guna dan hemat daya, maka dapat disimpulkan tingkat efisiensinya tinggi. Namun, apabila yang terjadi justru sebaliknya, maka sistem pendidikan tersebut tidak efisien. Beberapa hal yang terkait dengan masalah efisiensi pendidikan, di antaranya: penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana yang digunakan, dan sumberdaya manusia pada tingkat lembaga pendidikan.

   Masalah tersebut meliputi kurikulum, pengangkatan dan penempatan pendidik, peningkatan sarana dan prasanana dan pengembangan lembaga. Dalam hal pengangkatan, dapat dilihat dari *gap* antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Sedangkan masalah penempatan guru khususnya guru bidang penempatan studi sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sementara, dalam hal pengembangan lembaga pendidikan, pada umumnya terjadi keterlambatan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional.

4. Masalah Relevansi Pendidikan

   Salah satu peran penting pendidikan adalah membangun dan mengembangkan potensi-potensi manusia guna mempercepat pembangunan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relevansi pendidikana berkaitan dengan sejauh mana sistem pendidikan dapat mencetak *output* yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. *Output* pendidikan ditujukan untuk menjadi bagian dari seluruh bidang pembangunan nasional, yang di antaranya: bidang ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, *output* pendidikan nasional harus berkualitas.[12] Apabila sistem pendidikan nasional menghasilkan *output* yang dapat menopang seluruh aspek pembangunan, maka pendidikan dianggap relevan dengan realitasnya.

D. Hubungan Pendidikan dengan Dunia Kerja

Kebanyakan orang menganggap pendidikan sebagai cara mencapai pengelompokkan pekerjaan. Mereka bukan saja menganggapnya sebagai salah satu diantara sekian cara tetapi pandangan demikian cenderung menonjol. Anggapan ini yang pertama timbul, dan di daerah menurut mereka itulah akibat pendidikan yang paling penting untuk anak-anak mereka sendiri.

Pendidikan dan pekerjaan adalah konsep-konsep yang saling mengait dan tidak dapat terlepas dari pikiran masyarakat umum. Juga merupakan kenyataan yang objektif bahwa pendidikan ada hubungannya dengan kesempata bekerja. Jadi dari sudut pandangan pemakai, fungsi pendidikan yang pertama adalah menyiapkan anak-anak untuk memperoleh kedudukan dalam pekerjaan.

[12] Tirtarahardja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, 225-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan juga sangat erat kaitannya dengan persiapan tenaga kerja. Suatu pandangan tentang mendidik anak-anak yang khususnya dapat diterapkan pada pendidikan masa kini adalah pandangan yang melihat pendidikan di sekolah sebagai cara mempersiapkan anak-anak untuk memasuki berbagai pekerjaan dalam jumlah dan dengan keterampilan persiapan yang dituntut oleh sistem ekonomi.[13] Masalahnya adalah bahwa pendidikan terutama mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui pengaruhnya pada keterampilan intelektual, sosial, dan fisik dari produknya, yaitu peserta didik. Sementara kesempatan pendidikan menjadi makin meluas dan industri makin rumit tuntutannya, pendidikan memainkan peran yang makin penting dalam menentukan laju dan arah perubahan ekonomi. Sudah banyak usaha dari ahli ekonomi untuk mengukur nilai pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, pandangan yang meluas adalah bahwa "perkembangan orang-orang yang berpendidikan adalah formasi modal yang paling penting, jumlahnya, mutu, dan penggunaannya merupakan indeks yang paling berarti bagi kemampuan negeri untuk menghasilkan kekayaan"[14]

Direktur bagian analisi dari departemen ilmu-ilmu sosial UNESCO (UNESCO 1964) telah meringkas beberapa cara dan fungsi tenaga kerja dan fungsi latihan dari pendidikan:

1. Dampak ekonomi pendidikan yang langsung adalah pada jumlah dan mutu keterampilan kerja, dengan

[13]Mochtar Bukhori, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), 43

[14] Swift, *Sosiologi Pendidikan,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja biasanya merupakan tiga perempat dari keluaran nasional, dan pendidikan sumber utama prokdutivitas kerja

2. Sistem pendidikan juga dapat dipakai sebagai alat seleksi yang digunakan masyarakat untuk mendapat pimpinan, usahawan, administrasinya, dan ahli teknik, serta meningkatkan mutu mereka.[15]

Karena itu, fungsi pendidikan untuk memilih tenaga kerja adalah fungsi yang akan memberi keterangan banyak tentang akibat pendidikan.

Untuk mengantisipasi masa depan (dunia kerja) pendidikan harus selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyaratutama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan segala tantangannya. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Mengemukakan lima strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni:

1. Pendidikan untuk pengembangan iptek, dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital, seperti manufakturing pertanian, sebagai modal utama menghadapi globalisasi.
2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik.

15 Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia.[16]

Selama ini kita tahu proses belajar atau yang sering kita sebut pendidikan telah kita dapat di sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Sekolah menjadi penting artinya melalui sekolah kita mendapat pendidikan yang menentukan arah kehidupan kita dalam menapaki masa depan terutama dalam mencari sebuah pekerjaan. Seorang yang berkedudukan atau memiliki jabatan tinggi tentunya disertai dengan pendidikan yang tinggi pula. Misalnya seorang SBY yang menjadi seorang presiden sekaligus kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dia menjadi seorang presiden tentunya bukan sekedar lulusan SD, SMP, maupun SMA tetapi melalui pendidikan yang tinggi.

Tetapi disisi lain banyak juga lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik dari pada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja beralasan karena data sensus penduduk memperhatikan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan yang lebih rendah. Dengan kata lain persentase

[16] Tirtarahardja dan La Sasula, *Pengantar Pendidikan*), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah penganggur tenaga sarjana lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah pengganggur lulusan SD maupun SMP atau jenjang pendidikan yang lebih rendah. lebih rendah.

Sumber: BPS

Gambar 1.

Beberapa hal menjadi penyebab tingginya angka pengangguran ini, diantaranya adalah ketidak sesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidak seimbangan permintaan dan penawaran serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah. Kesempatan kerja yang terbatas telah membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan seringkali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Kondisi ini juga dapat diperlihatkan oleh perbandingan jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan pada Gambar 2. Sebagian besar tenaga kerja adalah berpendidikan menengah (SMA/SMK/MA) dengan rata-rata perbandingan tujuh banding satu dengan tenaga kerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berada pada level kompetensi yang relatif rendah.

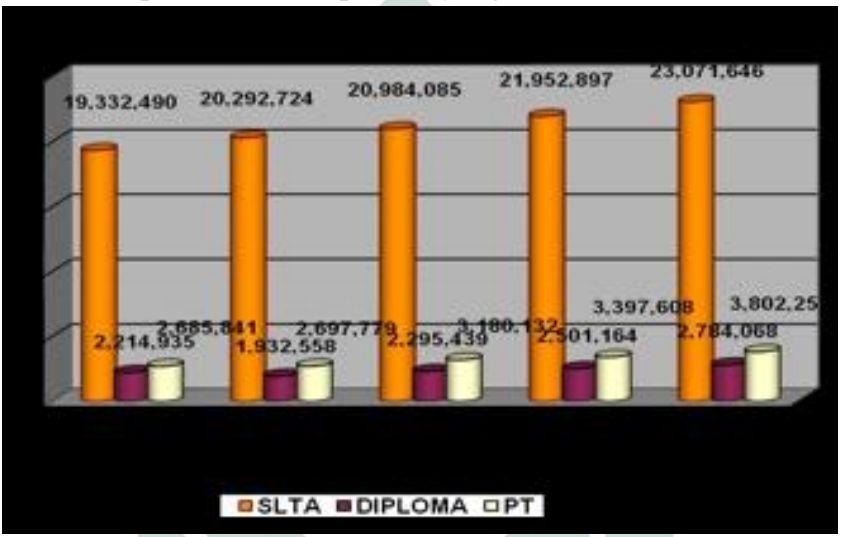

Gambar 2. Perkembangan proporsi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan (Sumber : BPS, 2007)

Namun, kritik tersebut juga belum benar seluruhnya karena cara berfikir yang digunakan dalam memberikan tafsiran terhadap data tersebut yang cenderung menyesatkan. Cara berfikir yang sekarang berlaku seolah-olah hanya memperhatikan pendidikan sebagai satu-satunya variabel yang menjelaskan masalah pengangguran. Cara berfikir seperti cukup berbahaya, bukan hanya berakibat pada penyudutan sistem pendidikan, tetapi juga cenderung menjadikan pengangguran sebagai masalah yang selamanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat terpecahkan.[17] Berdasarkan keadaan tersebut, masalah-masalah pengangguran tenaga terdidik yang dewasa ini banyak disoroti oleh masyarakat, sangat diperlukan. Penjelasan yang bersifat konseptual diharapkan mampu mendudukkan permasalahan pada proporsi yang sebenarnya, khususnya tentang fungsi dan kedudukan sistem pendidikan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. Berangkat dari asumsi bahwa bertambahnya tingkat pengangguran disebabkan karena kegagalan sistem pendidikan, maka diperlukan adanya pendekatan-pendektan tertentu dalam pendidikan.

E. *Output* Pendidikan dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Pendidikan nasional berhadapan dengan tantangan-tantangan di masa kini dan yang akan datang. Alumni perguruan tinggi misalnya. Banyak di antara mereka memiliki nilai bagus dengan gelar yang disandang. Namun ketika kembali ke lingkungan sosialnya tidak dapat menyesuaikan dengan realitas yang semakin berkembang. Realitas objektif di lingkungan masyarakat yang tidak sama dengan dunia kampus menyebabkan perguruan tinggi berkewajiban menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dan memiliki pengetahuan dan *skill* yang diharapkan masyarakat. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan zaman, perguruan tinggi harus mampu mengatasi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas perguruan tinggi sebenarnya tergantung pada pelayanannya terhadap masyarakat melalui peran *output*

[17] *Http://Bernaldoyudhawidyantoko.Blogspot.Com/2011/10/.* Diakses pada 10 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alumninya. Oleh sebab itu, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi harus berorientasi pada pengembangan *hard skill* dan *soft skill*, serta profesionalisme alumninya, agar dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat, bangsa dan negara.[18]

Tantangan yang menjadi pekerjaan sepanjang masa sebuah negara adalah persaingan dunia kerja. Saat ini banyak perguruan tinggi menghasilkan *output* yang siap bekerja telah diiringi dengan banyaknya tenaga kerja produktif. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan daya tampung dunia kerja yang memadai. Konsekuensi logisnya adalah banyak alumni perguruan tinggi yang menganggur. Di sisi lain, kondisi tersebut diperparah dengan fluktuasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki kecenderungan lebih produktif mencetak alumni dari pada memperluas lapangan kerja. Jadi, perguruan tinggi lebih berperan sebagai mesin penghasil ijazah dari pada luusan yang memiliki kematangan *skill* dan pengetahuan.

Fakta bebicara bahwa banyak alumni perguruan tinggi harus berjuang dalam waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah perkerjaan. Tidak jarang terjadi pekerjaan yang didapatkan tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, serta gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan

[18] Perguruan tinggi harus responsif terhadap kecenderungan keterbukaan dalam perkembangan dan perubahan zaman. Tantangan masa depan, khususnya era globalisasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perdagangan bebas harus dihadapi sekaligus diantisipasi sebagai langkah memperteguh identitas nasional. Perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri membuat suatu negara lebih dinamis dan inklusif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya pendidikan yang dikeluarkan. Strata pendidikan tinggi sebagai jaminan memperoleh pekerjaan yang sesuai telah menjadi doktrin di tengah masyarakat luas. Para sarjana yang masih terus disibukkan persoalan mencari pekerjaan, sementara ketersediaan lapangan kerja terlalu sempit menjadi kenyataan yang sulit dihindari. Dengan kata lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan kita masih berorientasi pada produktifitas menghasilkan *output* yang terkadang tingkat keilmuan, *skill* dan kemandirian masih belum mumpuni.

Kemampuan lulusan menciptakan lapangan kerja sendiri masih sedikit. Padahal, logika awam kita mengatakan seorang sarjana seharusnya memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang bukan sarjana. Seorang alumni perguruan tinggi mestinya mampu berfikir kreatif, inovatif dan progresif. Namun, pesoalannya adalah tidak semua sarjana mempunyai pemikiran seperti ini. Padahal, kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas pendidikannya. Realitas tersebut seolah menegaskan bahwa perguruan tinggi belum bisa mengatasi masalah pengangguran. Perguruan tinggi tidak dapat menjawab persoalan pengangguran memberi bukti nyata terkait hal tersebut. Nampaknya perlu evaluasi besar untuk menyelesaikan permasalahan yang demikian kompleks ini. Dalam dunia pendidikan, masalah terbesar yang harus menjadi prioritas penyelesaian adalah kualitas. Dengan kata lain, kualitas sistem pendidikan, pendidik, kesejahteraan pendidik, dan infrastrukturnya patut dicermati. Peningkatan kualitas pendidikan adalah penentu yang meningkatkan kesempatan orang terdidik mendapatkan pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih tingginya angka pengangguran di antaranya disebabkan oleh kompetensi keahlian tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, masih kakunya lulusan apabila telah berada di tengah masyarakat, dan *output* pendidikan tidak memiliki keahlian untuk bersaing di dunia kerja. Fakta mengenai tingginya angka pengangguran dewasa ini makin memprihatinkan. Perguruan Tinggi sering menempuh "jalan tol" dengan membuka program studi yang sedang diganderungi masyarakat hanya dengan tujuan untuk tetap bertahan. Sementara sarana dan prasarana pendukung masih belum lengkap dimiliki. Pada akhirnya, *output* yang dihasilkan tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja.[19] Berdasarkan realitas ini, seharusnya lembaga-lembaga pendidikan punya tanggung jawab moral terhadap alumninya. Solusi alternatifnya tentu saja membangun karakter *entrepreneur* dan *life skill*, sehingga alumni Perguruan Tinggi bukan sekadar mencari kerja, melainkan menciptakan lapangan kerja.

Permasalahan pengangguran terjadi akibat tidak sejalannya kebutuhan industri dengan kemampuan alumni perguruan tinggi. Dunia kerja mengajukan syarat-syarat kepada lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki *skill* individu, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan komunikasi, kerja tim, dan pengalaman kerja. Dan beberapa persyaratan tersebut tidak diperoleh dari perkuliahan formal. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memperolehnya dengan inisiatif sendiri. Misalnya melalui organisasi yang memiliki tradisi intelektual melalui diskusi, seminar atau

[19] http://anan-nur.blogspot.com/2011/01/sistem-pendidikan-nasional-realisasi.html. Diakses pada 02 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas bahasa asing. Kegiatan tersebut tentu dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Maka, perguruan tinggi harus memberi kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan *soft skill*nya. Dengan memilih opsi tersebut, mahasiswa akan lebih mampu membuka peluang lapangan pekerjaan baru dan tidak menggantungkan diri untuk mencari kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEBIJAKAN *FULL DAY SCHOOL* DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ANAK DIDIK

Oleh:
Nia Indah Purnamasari

A. Pembelajaran *Full Day School*

1. Pengertian *Full Day School*

Sebelum mendefinisikan *full day school*, terlebih dahulu di uraikan makna pembelajaran, sehingga antara pembelajaran dan *full day school* menjadi satu kesatuan bahasan yang mudah dipahami. Pembelajaran diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk membantu menfasilitasi belajar orang lain. Secara khusus, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu murid agar dapat belajar dengan mudah.[1] Adapun istilah *full day school* merupakan saduran dari bahasa Inggris, dimana full artinya penuh, *day* artinya hari dan *school* artinya sekolah.[2] Jadi secara terminologi *full day school* artinya belajar sehari penuh.

Fulday school sendiri merupakan satu istilah dari proses pembelajaran yang dilaksanakan sehari penuh, di mana aktivitas anak lebih banyak dilakukan di sekolah dari pada di rumah. Meskipun begitu, proses pembelajaran yang

[1] Setyosari, *Model Pembelajaran Konstruktivistik; Sumber Belajar; Kajian Teori dan Aplikasinya* (Malang: LP3UM, 2001), 24.

[2] Jhon Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996),Cet. XXIII, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lama di sekolah tidak hanya berlangsung di dalam kelas, karena konsep awal dibentuknya sekolah dengan sistem *full day school* ini bukan menambah materi ajar dan jam pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas seperti yang ada dalam kurikulum tersebut, melainkan tambahan jam sekolah ini digunakan untuk pengayaan materi ajar yang disampaikan dengan metode pembelajaran yang rekreatif dan menyenangkan untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru, pembinaan mental, jiwa dan moral anak. Dengan kata lain konsep dasar dari *full day school* ini adalah *integrated curriculum* dan *integrated activity*.

2. Dasar dan Tujuan Program *Full day school*

a. Dasar Program *Full day school*

Yang dimaksud dengan dasar adalah landasan tempat berpijak atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, yang dijadikan landasan suatu perbuatan itu harus mempunyai kekuatan hukum sehingga suatu tindakan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.[3]

Program *full day school* sebagai upaya intesifikasi faktor-faktor pendidikan dalam suatu proses belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang diambil oleh suatu institusi atau lembaga tertentu.

Untuk menjamin keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan diperlukan dasar atau landasar hukum yang kuat, sehingga yang dimaksud dengan dasar

[3] Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program *full day school* di sini adalah landasan tempat berpijak atau bersandar dari dikembangkannya sebuah program *full day school*. Adapun dasar program *full day school* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Dasar Ideal adalah Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan penetapannya sebagai dasar Negara adalah hasil kesepakatan para negarawan bangsa Indonesia. Oleh karenanya segala usaha bagi setiap warga Negara juga harus merujuk pada pancasila, lebih-lebih dibidang pendidikan yang berusaha untuk mencetak segenap warga berjiwa pancasila.[4]

b) Dasar Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

"Dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat termaktub:

[4] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (yaitu UUPP. No. 4 tahun 1950, UUPP No. 12 Tahun 1945).[5]

c) Dasar Operasional
   1. UUPD No. 4 Tahun 1950, UUPP No. 12 Tahun 1945, yang berbunyi: "Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas termaktub dalam pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia".
   2. TAP MPR No. II/MPR/1978 (penjabarannya pada p-4) yang berbunyi: " Bahwasanya yang telah di terima dan ditetapkan sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kepribadian dan pendangan hidup bangsa.
   3. Keputusan Presiden No. 145 tahun 1965, yang berbunyi "Pancasila ..adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia …..oleh karena itu, dasar/asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah pancasila".
   4. UURI No. 4/1950 tentang tujuan pendidikan nasional yang berbunyi "Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik

[5] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".

5. PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional yang berbunyi "bahwa Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk meng-optimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia".

b. Tujuan Program *Full day school*

Tujuan pendidikan merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh suatu tindakan mendidik. Mendidik merupakan tindakan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan di dalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgen sebab pendidika tanpa sebuah tujuan bukanlan dikatakan sebagai pendidikan.

Di dalam suatu organisasi pendidikan, tujuan pendidikan telah terumuskan dalam berbagai tingkat tujuan, yaitu:

1. Tujuan pendidikan nasional
2. Tujuan Institusional
3. Tujuan kurikulum
4. Tujuan Instruksional (pengajaran)[6]

Semua tujuan tersebut diatas merupakan suatu urutan yang hirarki yang saling mendukung antara tujuan yang satu dengan yang lainnya, serta tujuan nasional sebagai ending, sehingga semua rumusan tujuan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat

[6] Suharsimi Arikonto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusia* (Bandung: Rineka Cipta, 1993), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggi harus berpijak dan berdasar kepada tujuan pendidikan nasioanl.

Jadi yang dimaksud dengan tujuan program *full day school* disini adalah hasil akhir yang diharapkan oleh lembaga pendidikan tertentu atas usaha intensifikasi faktor pendidikan dalam proses belajar mengajar disekolah.

Sistem *full day school* pada dasarnya menggunakan sistem *integrated curriculum* dan *integrated activity* yang merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk seoran ganak (siswa) yang berintelektual tinggi yang dapat memadukan aspek keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik dan Islami. Dengan adanya garis-garis besar program dalam sistem *full day school*, sekolah yang melaksanakan program ini diharapkan dapat mencapai target tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan yang melaksanakan sistem *full day school*.[7]

Adapun garis-garis besar program *full day school* adalah sebagai berikut:

1. Pembentuk sikap yang Islami
    a. Pembentukan sikap yang Islami
        1) Pengetahuan dasar tentang Iman, Islam dan Ihsan
        2) Pengetahuan dasar tentang akhlak terpuji dan tercela
        3) Kecintaan kepada Allah dan Rosulnya

[7] Sehudin, *Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Full Day School Terhadap Akhlak Siswa* (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan, 2005), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kebanggaan terhadap Islam dan semangat memperjuangkan.

b. Pembiasaan Berbudaya Islam
   1) Gemar beribadah
   2) Gemar belajar
   3) Disiplin
   4) Kreatif
   5) Mandiri
   6) Hidup bersih dan sehat
   7) Adab-adab Islam

2. Penguasaan Pengetahuan dan Keterampilan
   a. Pengetahuan materi-materi pokok program pendidikan
   b. Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari.
   c. Mengetahui dan terampil baca dan tulis Al-Qur'an
   d. Memahami secara sederhana ia kandungan amaliyah sehari-hari.[8]

3. Karakteristik *Full Day School*

Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan di berikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan semangat yang ada di daerah. Dengan kebijakan semancam ini masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan inisiatifnya dalam pengelolaan lembaga pendidikan di daerah sesuai dengan latar buda-yanya. Pemerintah pusat cukup memberikan kurikulum

[8] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar nasiona, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada daearah, terutama dalam menentukan muatan lokal.

Otonomi pendidikan disambut baik oleh lembaga pendidikan swasta dengan membenahi keadaan yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, disamping itu juga adanya kebutuhan masyarakat yang disebutkan dengan tugas pekerjaan keseharian dan menginginkan pendidikan yang berkualitas, keadaan semacam ini direspon dengan menyelenggarakan model pembelajaran *full day school*, dalam arti kegiatan belajar-mengajar diperpanjang sampai sore hari. Maka sebagai konsekuensi perlu adanya pengelolaan yang baik, khususnya dalam pembelajaran yang berhubungan dengan waktu belajar yang efektif, pengajaran terstruktur dan kesempatan untuk belajar.[9]

Karakteristik yang paling mendasar dalam model pembelajaran *full day school* proses *integrated curriculum* dan *integrated activity* yang merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk seorang anak (siswa) yang berintelektual tinggi yang dapat memadukan aspek keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik dan Islami.

Sekolah yang menerapkan pembelajaran *full day school*, dalam melaksanakan pembelajarannya bervariasi, baik di tinjau dari segi waktu yang dijadwalkan maupun kurikulum lembaga atau lokal yang digunakan, pada prinsipnya tetap mengacu pada penanaman nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia sebagai bekal kehidupan

[9] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatang disamping tetap pada tujuan lembaga beraupa pendidikan yang berkualitas.[10]

Dengan demikian sekolah dasar *full day school*, disyaratkan memenuhi kriteria sekolah efektif dan mampu mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan tujaun lembaga berupa lulusan yang berkualitas secara efektif dan efisien.

B. Tinjauan tentang Prestasi Belajar Siswa

1. Definisi Prestasi Belajar

Dalam proses pembelajaran tidak lepas dari adanya penilaian dan pengukuran. Dengan mengetahui prestasi belajar peserta didik, maka kita dapat memetakan kemampuan anak didik di dalam kelas. Berbicara masalah prestasi belajar, pada dasarnya banyak para ahli yang mencoba memberikan pendapatnya untuk memperoleh suatu pengertian secara actual. Pengertian prestasi belajar mempunyai dua macam istilah yaitu prestasi dan belajar. Dengan demikian untuk merumuskan pengertian tersebut secara keseluruhan terlebih dahulu penulis kemukakan satu persatu kemudian secara keseluruhan.

a. Pengertian Prestasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia prestasi adalah hasil yang dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb).[11] Sedangkan menurut M. Bukhori

[10] Moch.Romli, *Manajemen Pembelajaran di Sekolah Dasar Full Day School* (Disertasi------UM Malang, 2004), 18.

[11] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 700.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi adalah menunjukkan hasil yang nyata dari suatu usaha atau pekerjaan.[12]

Dari pendapat diatas dapat kita pahami bahwa prestasi adalah kemampuan atau hasil yang dicapai siswa pada satu periode tertentu dalam bentuk angka yang merupakan hasil evaluasi belajar.

b. Pengertian belajar

Untuk memperoleh pengertian belajar ada beberapa definisi antara lain: belajar dapat didefinisikan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan didalam diri seseorang mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.[13]

Menurut Slameto, belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan sikap dan karakter yang baru, sebagai hasil pengamalaman dalam interaksi dengan lingkungan-nya.[14] Sementara itu, Sardiman mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan tingkah laku dan karakter, dengan beberapa kegiatan membaca, menulis, mende-ngarkan, meniru mengamati, dan lain sebagainya.[15]

Dari pengertian prestasi dan belajar tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa prestasi belajar siswa adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah

12 M. Bukhori, *Teknik Evaluasi Dalam Pendidikan* (Jakarta: Jermars, 1986), 178.

13 Ahmad Mudzakir, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 34.

14 Slameto, *Belajar*, 2.

15 Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami proses pembelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru dalam jangka waktu tertentu.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Pada hakikatnya prestasi belajar yang dicapai anak didik adalah hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari internal ataupun eksternal. Pemahaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat penting dengan tujuan membantu peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang. Faktor internal dapat diklasifikasi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, psikologi, dan kelelahan.[16]

1) Faktor Jasmaniah

a) Cacat tubuh

Cacat tubuh berpengaruh terhadap proses belajar. Siswa yang memiliki tubuh yang cacat, proses belajarnya tidak akan berjalan dengan baik. Apablia hal ini diamali oleh peserta didik, maka sebaiknya proses belajar diarahkan pada lembaga pendidikan khusus atau difasilitasi dengan alat bantu agar dapat membantu proses belajarnya.

[16] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kesehatan

Apabila kesehatan seseorang terganggu, maka proses belajarnya akan terganggu pula. Dalam kondisi yang kurang sehat, seorang anak didik akan cepat lelah, kurang semangat, dan mengantuk. Demikian pula apabila badannya lemah, kurang darah ataupun ada kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Olah raga, makan, tidur dan istirahat yang cukup, maka akan membuat kesehatan seseorang tetap terjaga, sehingga seseorang dapat belajar dengan baik.

2) Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar di antaranya: perhatian, intelegensi, minat, bakat, motivasi, kematengan, dan kesiapan.[17]

a) Perhatian

Apabila bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka akan timbul kebosanan, sehingga ia enggan untuk belajar. Untuk itu,agar dapat menjamin proses belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap materi yang dipelajarinya.Bagi pendidik, agar siswa dapat belajar dengan baik, upayakan materi pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran tersebut sesuatu dengan potensinya.

[17] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Intelegensi

Intelegensi adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan balajar seorang siswa. Dalam evaluasi pembelajaran, siswa yang memmiliki intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang memiliki intelegensi rendah. Namun, siswa yang memiliki tingkat intelegensi tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal inidikarenakan belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya.

c) Minat

Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar.Minat sendiri merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenal beberapa bagian. Apabila materi yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka dampaknya siswa tersebut tidak akan belajar dengan baik.

d) Bakat

Bakat merupakan kemampuan yang akan teraplikasi menjadi kecakapan yang nyata setelah siswa belajar. Bakat juga mempengaruhi belajar. Apabila materi pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik.

e) Motivasi

Motivasi dapat ditanamkan pada diri siswa dengan cara memberikan latihan-latihan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dalam proses belajar harus diperhatikan motivasi yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik.

f) Kamatangan

Kematangan adalah suatu tahap dalam pertumbuhan siswa dimana bagian-bagian tubuhnya telah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Dengan kematangan, belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus menerus. Untuk itu, diperlukan latihan-latihan dan bimbingan dalam proses belajat. Belajar akan lebih berhasil apabila siswa telah siap. Oleh sebab itu, kemajuan baru untuk memiliki kecakapan tersebut tergantung dari kematangan dan belajar.

g) Kesiapan

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon pada stimulus atau kondisi tertentu.Kesiapan harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena apabila siswa belajar dan telah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan berkembang.

3) Faktor kelelahan

Kelelahan diklasifikasi menjadi 2 jenis, yakni kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani dapat dilihat dengan lemah dan lemasnya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena ketidakberaturan sisa pembakaran didalam tubuh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga darah kurang lancar pada bagian tertentu. Sementara kelelahan rohani dapat dilihat dari adanya kebosanan, sehingga menyebabkan berkurangnya minat dan dorongan untuk belajar.

Kelelahan jasmani dan rohani dapat dihilangkan dengan cara beristirahat, mengusahakan variasi metode belajar, rekreasi, olah raga secara teratur, mengimbangi makan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, dan yang utama adalah meningkatkan ibadah.[18]

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang datang dari luar individu. Faktor ini dapat diklasifikasi menjadi 3, di antaranya: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.

1) Faktor keluarga

Cara orang tua mendidik anak, hubungan antara anggota keluarga, kondisi rumah, kondisi ekonomi keluarga, perhatian orang tua kepada anak dan latar belakang kebudayaan merupakan pengaruh dari lingkungan keluarga. Beberapa faktor tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

a) Cara orang tua mendidik anak

Prestasi anak sangat dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik di lingkungan keluarga. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, akan menyebabkan anak kurang berhasil dalam proses belajarnya.

[18] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hubungan antar anggota keluarga

Hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan yang terpenting dalam hal hubungan antar anggota keluarga. Pada saat yang sama, hubungan anak dengan saudaranya atau anggota keluarga yang lain juga mempengaruhi proses belajar anak. Untukkeberhasilan belajar anak, maka harus diupayakan hubungan yang baik didalam keluarga tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh perhatian dan kasih sayang yang diiringi dengan bimbingan dan jika diperlukan, hukuman sebagai media *punishment* edukatif kepada anak anak.

c) Kondisi rumah

Kondisi rumah yang gaduh dan tidak beraturan tidak akan memberi situasi tenang kepada anak yang sedang belajar. Supaya anak belajar dengan baik dan benar, maka harus diciptakan kondisi rumah yang tenang dan kondusif, sehingga anak dapat belajar dengan baik.

d) Kondisi ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi keluarga memiliki relasi dengan proses belajar anak. Yang berkenaan dengan kondisi ekonomi tersebut di antaranya: fasilitas belajar seperti buku bacaan, buku tulis, meja, penerangan, alat-alat tulis, lain sebagainya.Apabila kondisi keluarga yang kurang mampu, dan kebutuhan belajar anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang terpenuhi, konsekuensinya akan menggganggu belajar anak.

e) Latar belakang kebudayaan

Dalam diri seorang anak perlu ditanamkan dalam diri anak kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong semangat anak untuk belajar. Karena tingkat pendidikan atau tradisi di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar.

2) Faktor sekolah

Faktor sekolah yang berpengaruh terhadap proses belajar terdiri dari: metode pembelajaran, kurikulum, hubungan guru dengan anak didik, kedisiplinan di sekolah, durasi waktu sekolah, standar pembelajaran dan pekerjaan rumah (PR).

a) Metode pembelajaran

Metode pembelajaran guru yang monoton atau tidak variatif akan mempengaruhi belajar siswa. Misalnya guru kurang mempersiapkan dan kurang menguasai materi, sehingga guru tersebut menyampaikannya tidak jelas. Konsekuensinya adalah siswa kurang senang terhadap pelajaran.

b) Kurikulum

Kurikulum dalam hal ini merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada anak didik. Kurikulum yang dirancang kurang baik berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Kurikulum yang dirancang kurang baik adalah kurikulum yang terlampau padat, materi di luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan siswa, tidak selaras dengan minat dan bakat siswa, dan sebagainya.

c) Hubungan guru dengan anak didik

Proses pembelajaran terjadi antara guru dengan anak didik dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam anak didiktersebut. Dengan kata lain, cara belajar anak didik dipengaruhi oleh hubungannya dengan guru. Guru yang kurang berkomunikasi dengan anak didik dengna baik, menyebabkan proses pembelajaran kurang baik. Demikian pula apabilaanak didik merasa jauh dari guru, maka akan timbul rasa segan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Namun apabila hubungan antara guru dan anak didik terjalin dengan baik, maka anak didik akan merasa akrab dan senang pada mata pelajaran tersebut.

d) Kedisiplinan di sekolah

Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa di sekolah. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, pegawai, sisiwa dan seluruh komponen sekolah. Kedisiplinan di sekolah memberi dampak positif terhadap belajar siswa.

e) Hubungan siswa dengan siswa lainnya

Merealisasikan hubungan yang baik antar siswa adalah sebuah urgensi yang harus dilakukan oleh piha sekolah dan siswa agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memberikan dampak positif terhadap belajar siswa.

f) Alat Pembelajaran

Alat pembelajaran yang lengkap dan efektif dapat mempercepat pemahaman terhadap materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Apabila siswa mudah menerima materi pelajaran, maka proses dan hasil belajar siswa akan lebih baik. Sebuah institusi sekolah yang cukup peralatan belajarnya dan diiringi dengan cara mengajar yang baik dari guru, maka akan mempercepat proses belajar anak.[19]

g) Durasi (waktu) sekolah

Durasi sekolah adalah waktu pemberlakuan proses belajar mengajar di sekolah. Idealnya, siswa belajar di waktu pagi, karena otak masih segar danbadan dalam keadaan baik. Jika siswa belajar pada saat kondisinya sudah lemah, misalnya siang hari, maka siswa akan mengalami kesulitan belajar yang disebabkan karena konsentrasi yang lemah.[20]

h) Pekerjaan rumah (PR)

Dalam pemberian pekerjaan rumah, sebaiknya seorang guru jangan terlampau sering dan banyak memberikan tugas. Karena dampaknya adalah siswa tidak mempunyai waktu senggang untuk mengerjakan yang lain.

---

[19] Purwanto, *Psikologi,* 105.

[20] Wiwin Widyawati, *Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar* (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2002), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh karena keberadaan siswa dalam masyarakat merupakan suatu hal yang terelakkan. Berikut penulis akan paparkan terkait posisi dan kondisi siswa di lingkungan masyarakat:[21]

a) Kegiatan siswa di lingkungan masyarakat

Dalam mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat, sebaiknya siswa dapat mengatur waktu. Hal yang memungkinkan adalah memilih kegiatan yang mendukung belajarnya, misalnya pembekalan, penyuluhan atau belajar kelompok.

b) Teman bergaul

Memilih teman bergaul yang baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua harus bijak. Apabila teman bergaul yang dipilih baik, maka akan berpengaruh terhadap diri siswa. Sebaliknya, teman bergaul yang kurang baik akan memberi dampak yang negatif pada diri siswa.

c) Kehidupan masyarakat

Kehidupan masyarakat disekitar siswa berpengaruh pada proses belajar. Masyarakat yang terpelajar maka akan memotivasi anak untuk giat dalam belajar.[22]

[21] Ibid., 70.
[22] Suryabrata, *Proses,* 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Usaha Pencapaian Prestasi Belajar

Pencapaian prestasi belajar anak didik pastilah tidak lepas dari pembicaraan kita mengenai factor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak didik. Sebab antara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.

Apabila faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak didik sudah terpenuhi secara positif maka prestasi belajarpun akan mendapatkan nilai yang positif atau meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak didik belum mampu terpenuhi secara positif, maka hasil belajarpun akan mendapat nilai yang negatif.

Seperti sub pembahasan yang lalu dikemukakn bahwa secara garis besar yang mempengaruhi belajar anak didik ada 2 hal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak dan faktor yang berasal dari luar anak.

Yang dimaksud dengan terpengaruhinya faktor yang berasal dari dalam diri anak adalah terpenuhinya faktor fisiologis dan faktor psikologis anak. Faktor fisiologis yang harus terpenuhi dalam upaya pencapaian atau upaya peningkatan prestasi belajar anak adalah usaha penjagaan agar panca indera anak dapat berfungsi dengan baik, baik penjagaan yang bersifat kuratif maupun prefentif, seperti adanya pemeriksaan dokter secara periodic, ataupun penempatan anak didik dalam kelas secara bergantian secara posisi agar tidak merusak kesehatan mata. Selanjutnya pula penyembuhan kadar gizi pada siswa harus terpenuhi. Sutratina mengemukakan bahwa kadar gizi yang terkandung dalam makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar pertumbuhan dan perkembangan jasamaniah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rohaniah serta intelegensi juga menentukan produktivitas seseorang. Seandainya terjadi kekurangan gizi maka pertumbuhan yang bersangkutan akan terhambat, terutama perkembangan mental. Apabila otak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara abnormal akibatnya menjadi kurang cerdas.[23] Faktor psikologis yang harus dipenuhi adalah kemampuan intelegensi yang dimiliki siswa sebagai modal awal batasan-batasan keberhasilan ditambah pula dengan adanya penelurusan bakat dan minat yang dimilikinya dan dimiliki pula oleh motivasi dalam diri siswa atau dari luar diri siswa terhadap bakat yang dimiliki akan sangat terpengaruh terpengaruh terhadap pembinaan belajar siswa.

Adapun yang dimaksud dengan terpenuhinya faktor yang berasal dari luar diri siswa adalah meliputi kualitas sekolah yang baik dan mendukung terjadinya proses belajar-mengajar yang baik. Kelompok dan keadaan lingkungan yang mendukung terhadap program pendidikan anak yang meliputi: keadaan udara, cuaca, waktu (pagi, siang ataupun malam), tempat (letak atau pergedungannya), alat-alat yang dipakai untuk belajar dan sebagainya. Semua faktor tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengungtungkan proses belajar mengajar secara maksimal. Letak geografis sekolah yang tidak terlalu dekat dengan kebisingan harus memenuhi syarat kesehatan, alat-alat belajar memenuhi dedaktis psikologis maupun pedagogis. Keadaan lingkungan keluarga yang harmonis dengan perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar yang tinggi,

[23] Sutratina Tirto Negoro, *Anak Super Normal dan Problem Pendidikannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1984),21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi keluarga mampu, sehingga kebutuhan belajar anak terpenuhi serta adanya waktu belajar yang disediakan dan juga tempat belajar yang nyaman dengan suasana yang menyenangkan, lingkungan pergaulan anak di masyarakat yang mendukung anak untuk selalu berlomba mencari prestasi dengan teman-temannya, kelompok belajar yang di kembangkan diantara teman-temannya dan juga lingkungan sekolah yang selalu mengkondisikan anak selalu hidup disiplin penuh kekluargaaan diantara teman dan para pengajar. Semua faktor itulah yang mempu untuk mendorong prestasi belajar siswa.

C. Pembelajaran *Full Day School* dan Prestasi Belajar Anak Didik

Uraian terkait pembelajaran *full day school*, komponen yang dimilikinya danterkait prestasi belajar adalah jembatan pembahasan menuju bahasan selanjutnya, yaitu korelasi dari kedua variabel tersebut.Seperti yang telahdibahas sebelumnya, bahwa program *full day school* adalah produk penamaan suatu lembaga pendidikan dari upaya mengintensifkan proses pembelajaran dalam sistem pendidikan. Proses tersebut dalam suatu tujuan pendidikan merupakan kebijakan institusi pendidikan yang mengatur program tersebut.Tujuannya jelas untuk menentukan tujuan institusinya yang tidak terlepas dari cita-cita lembaga.

Dalam menentukan tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan nasional secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum. Hal ini dikarenakan seluruh aspek pendidikan harus selaras dengan kepentingan dan tujuan nasional.[24]

Intensifikasi pembelajaran *full day school* yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar anak didik. Jika prestasi dijadikan sebagai tujuan akhir dari program, maka prestasi disini akan berperan sebagai alat evaluasi suatu upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Evaluasi tersebut dapat bermanfaat terhadap pendidik dan anak didik. Guru dan peserta didik mengambil fungsi dari tujuan itu untuk mengevaluasi segala hal yang telah dilakukan, baik berkenaan dengan manajerial suatu program ataupun dalam implementasi kurikulum yang digunakan oleh suatu institusi pendidikan. Guru bisa menakar nilai akurasi metode yang digunakan dalam proses pembelajaran terhadap sisiwa, dan siswa dapat mengevaluasi tingkat kesungguhannya selama proses pembelajaran. Dari fungsi evaluasi tersebut akan muncul motivasi memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan.[25]

Oleh sebab itu, apabila kita lihat dalam diskursus prestasi belajar, maka motivasi merupakan faktor penting yang berpengaruhterhadap tingkat prestasi anak didik. Motivasi belajar adalah faktor psikologis yang sifatnya non intelektual. Fungsinya yang khas adalah dalam hal semangat belajar anak didik dan guru serta seluruh komponen sekolah untuk memperbaikidan meningkatkan hasil yang ingin dan telah dicapai. Dengan motivasi yang

[24] Ahmad Syarif, *Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah* (Bandung: Citra Umbara, 1995), 8.

[25] W.S. Wingkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar* (Jakarta: Gramedia, 1984), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi akan mampunyai energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar yang banyak bagi anak didik. Jadi di sini terlihat tingkat efektivitas pembelajaran *full day school* terhadap prestasi belajar siswa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HOMESCHOOLING; Pendidikan Alternatif di Era Digital

Oleh:
Ika Agustin Widyawati

Pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya dalam dimensi intelektual, moral, dan psikologis. Pendidikan sejak awal adalah tugas orang tua dan masyarakat.[1] Perkembangan masyarakat yang modern menuntut bahwa sebagian tugas pendidikan dijalankan oleh institusi yang disebut sekolah, khususnya di bidang pengajaran. Pendidikan sekolah harus memperhatikan perkembangan setiap individu. Tetapi guru kerap kali hanya memperhatikan kesalahan atau kelemahan murid, bukan potensi atau kekuatan murid. Selain itu, buruknya lingkungan sekolah serta diperkuat dengan makin meningkatnya pengangguran akhir-akhir ini menandakan bahwa sekolah gagal mencetak manusia yang produktif. [2]

Sekolah hanya lebih mampu memberi tugas-tugas kepada siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang mengawang-awang, yang mana siswa tidak mampu menterjemahkan pemahaman terhadap soal tersebut di kehidupannya. Akibatnya siswa kurang kreatif dengan waktu lama hanya untuk memikirkan

[1] J.I.G.M.Drest, *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik?* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 32.
[2]Lihat Sumardiono, *Homescooling; Lompatan Cara Belajar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran-pelajaran yang ia tidak ketahui mau diapakan. Sehingga berbagai kekecewaan terhadap institusi sekolah merupakan alasan utama orang tua memilih *homeschooling* untuk anak-anaknya.

Adapun status *homeschooling* di Indonesia adalah legal dan diatur di bawah Sistem Pendidikan Nasional 2003 di bawah Divisi Pendidikan Informal, legalitasnya diakui sama dengan pendidikan formal karena dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui ujian kesetaraan.

Homeschooling memberikan kebebasan kepada orang tua untuk memberikan pola pembelajaran yang cocok untuk anaknya dalam mengembangkan bakat dan kreatifitasnya. Kurikulum *homeschooling* yang digunakan disesuaikan untuk meningkatkan bakat dan kreatifitas siswa, sehingga siswa menjadi nyaman saat pembelajaran.

Sebagai sebuah sistem yang dibuat, sekolah memang perlu perbaikan secara simultan sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap institusi ini. Berbagai sistem baru telah banyak bermunculan untuk menyempurnakan atau bahkan sampai untuk mengganti sistem sekolah, salah satunya adalah *homeschooling* yang akan penulis bahas dalam makalah ini. Adapun fokus pembahasan makalah ini yaitu mengenai pengertian *homeschooling,* dasar dan tujuan *homeschooling*, implementasi*homeschooling*, serta kelebihan dan kekurangan dari *homeschooling*.

A. Pengertian *Homeschooling*

Dalam Bahasa Indonesia, *Homeschooling* berarti "sekolah rumah". Selain itu, *Homeschooling* juga diterje-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahkan sebagai sekolah mandiri. Menurut Abdurrahman (2008) dalam Jamal Ma'mur A. (2012: 46),[3] selain *homeschooling* ada beberapa yang memiliki arti model alternatif belajar selain di sekolah yaitu *home education*, dan *home based learning*. Secara umum *homeschooling* merupakan model pendidikan dimana keluarga memilih bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan memakai rumah sebagai basis pendidikannya. Pada *homeschooling*, orang tua bertanggung jawab aktif atas proses pendidikan anak, sementara pada sekolah reguler tanggung jawab itu diamanahkan kepada guru dan sistem sekolah.

Walaupun orang tua menjadi penanggung jawab utama *homeschooling*, akan tetapi pendidikan *home-schooling* tidak harus dilakukan oleh orang tua. Selain mengajar sendiri, orang tua dapat mengundang guru privat, mendaftarkan kursus, melibatkan anak pada proses magang (*internship*), dan sebagainya. Para orang tua *homeschooling* dapat menggunakan sarana apa saja dan di mana saja untuk kelangsungan pendidikan *homeschooling* anaknya. Sehingga siswa dapat belajar di alam bebas baik di laboratorium, perpustakaan, museum, tempat wisata, dan lingkungan sekitarnya.

Jadi, inti dari *homeschooling* yaitu model pendidikan informal dimana orang tua sebagai guru utama atau penanggungjawab secara aktif pada proses pendidikan, mulai dalam hal penentuan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan

[3] Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Pintar Homeschooling* (Jogjakarta: Flash books, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hendak dicapai, kurikulum dan materi pembelajaran sampai metode belajar serta praktik belajar sehari-hari.

Dalam prakteknya, *homeschooling* tidak harus memenuhi penyetaraan pendidikan. Pendidikan kesetaraan adalah hak dan bersifat pilihan. Praktisi *homeschooling* memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan tujuan yang terbaik bagi anaknya. Penyetaraan ini bertujuan agar dapat dihargai dan setara dengan pendidikan formal.Hal ini dilakukan, setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Penyetaraan dalam praktek *homeschooling* yaitu penyetaraan tujuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, ujian, dan penilaian.. Pendidikan kesetaraan dalam ujian nasional meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Selain itu, hasil belajar *homeschooling* dapat diakui dari rapor, portofolio, CV (*Curiculum Vitae)*, sertifikasi, dan berbagai bentuk prestasi lain atau tes penempatan.

B. Dasar dan Tujuan *Homeschooling*

Adapun dasar keberadaan dari *homeschooling* Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 pasal 27 yang berbunyi :[4]

1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri.

[4] *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Secara umum tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan menurut Jamal Ma'mur A. *Home-schooling* memiliki beberapa tujuan, yaitu:[5]*Pertama,* menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari anak dan keluarga yang memilih jalur *homeschooling, Kedua*, menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup, dan *Ketiga,* melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

C. Kurikulum *Homeschooling*

Karakter yang melekat dalam *homeschooling* adalah sesuai kebutuhan anak dan kondisi keluarga *(customized education),*sehingga *homeschooling* mempunyai model dan pendekatan yang beraneka ragam sesuai dengan kondisi keluarga yang akan menjalankan *homeschooling.* Adapun pendekatan (*approachs*) dalam *homeschooling*

[5] Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Pintar Homeschooling* (Jogjakarta: Flash books, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki rentang yang lebar antara yang tidak terstruktur (*unschooling*) sampai yang sangat terstruktur seperti belajar di sekolah (*school at-home*). Sumardiono (2007) menyebutkan beberapa pendekatan dalam *homeschooling*, sebagai berikut:[6] (a) *School at-home approach* adalah model pendidikan yang serupa dengan yang diselenggarakan di sekolah. Hanya saja, tempatnya di rumah. Metode ini sering disebut *textbook approach*, *traditional approach*, atau *school approach*; (b) *Unit studies approach* adalah model pendidikan yang berbasis pada tema (*unit study*). Pada pendekatan ini, siswa tidak belajar satu mata pelajaran tertentu (matematika, bahasa, IPA, atau IPS), tetapi mempelajari beberapa mata pelajaran sekaligus melalui sebuah tema yang dipelajari. Metode ini berkembang atas pemikiran bahwa proses belajar seharusnya terintegrasi (*integrated*), bukan terpecah-pecah (*segmented*). Misalnya, dengan tema tentang rumah, anak-anak dapat belajar bentuk geometri (matematika), jenis-jenis rumah (sejarah), fungsi rumah (IPA), profesi pembangun rumah (IPS), dan sebagainya; (c) *The living books approach* adalah metode pendidikan melalui pengalaman dunia nyata. Metode ini dikembangkan oleh Charlotte Mason. Pendekatannya dengan mengajarkan kebiasaan baik (*good habit*), keterampilan dasar (membaca, menulis, matematika), serta mengekspos anak dengan pengalaman nyata, seperti berjalan-jalan, mengunjungi museum, berbelanja ke pasar, mencari informasi di perpustakaan, menghadiri pameran, dan sebagainya; (d) *The classical approach*

[6] Sumardiono, *Homeschooling, Lompatan Cara Belajar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah model pendidikan yang dikembangkan sejak abad pertengahan. Pendekatan ini menggunakan kurikulum yang distrukturkan berdasarkan tiga tahap perkembangan anak yang disebut trivium. Penekanan metode ini adalah kemampuan ekspresi verbal dan tertulis. Pendekatannya berbasis teks/literatur (bukan gambar/*image*); (e) *The waldorf approach* adalah model pendidikan yang dikembangkan oleh Rudolph Steiner, banyak ditetapkan di sekolah-sekolah alternatif Waldorf di Amerika. Karena Steiner berusaha menciptakan setting sekolah yang mirip keadaan rumah, metodenya mudah diadaptasi untuk *homeschool*; (f) *The Montessori approach* adalah model pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Pendekatan ini mendorong penyiapan lingkungan pendukung yang nyata dan alami, mengamati proses interaksi anak-anak di lingkungan, serta terus menumbuhkan lingkungan sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensinya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual; (g) *Unschooling approach* berangkat dari keyakinan bahwa anak-anak memiliki keinginan natural untuk belajar dan jika keinginan itu difasilitasi dan dikenalkan dengan pengalaman di dunia nyata, maka mereka akan belajar lebih banyak daripada melalui metode lainnya. *Unschooling* tidak berangkat dari *textbook*, tetapi dari minat anak yang difasilitasi; dan (h) *The eclectic approach* memberikan kesempatan pada keluarga untuk mendesain sendiri program *homeschooling* yang sesuai, dengan memilih atau menggabungkan dari sistem yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, keluarga*homeschooling* dapat memilih kurikulum yang akan diterapkan. Jika kurikulum nasional sebagai acuan, maka ada satu jenis kurikulum yang dibuat oleh Depdiknas**,** yaitu kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum sekolah ini di dapat pada situs Pusat Kurikulum Depdiknas (Puskur).[7] Meskipun menerapkan kurikulum nasional seperti sekolah, kreativitas bagi keluarga *homeschooling* tetap terbuka. Banyak aspek dalam proses belajar dalam *homeschooling* yang dapat dimodifikasi sesuai gaya belajar anak agar mendapatkan hasil yang maksimal. Keluarga *homeschooling* juga dapat memilih sendiri buku referensi apa yang paling disukai, waktu belajar, dan juga cara mempelajari suatu mata pelajaran. Di luar mata pelajaran yang diujikan dalam ujian penyetaraan, anak-anak *homeschooling* tetap dapat mempelajari berbagai hal yang menjadi minat dan perhatiannya.

Selain itu, keluarga *homeschooling* juga dapat membuat kurikulum sendiri untuk pendidikan anaknya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menerapkan kurikulum *homeschooling* yaitu:[8]

1. Tahap pertama dalam menyusun kurikulum *homeschooling,* kita bisa mencari dahulu kompetensi apa yang harus dikuasai anak.
2. Tahap kedua, kita bisa mulai menyusun semua kompetensi yang ada dalam diri anak tersebut.

---

[7] http://www.Psikologizone.com/pengertian-*homeschooling*-Indonesia / 06511347. Diakses pada 27 Mei 2017.

[8] S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara,2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahap selanjutnya, kita dapat membuat metode yang menyenangkan dalam pembelajaran.

D. Implementasi *Homeschooling*

Home itu bukan sejumlah fasilitas yang mewah. Akan tetapi, anak sering merasa aman, merasa dilindungi dan paling penting merasa dihargai, mengetahui bahwa pandangan dan pendapat mereka didengar dan kalau bisa diterima. Yang paling penting, orang tua merupakan pegangan hidup.[9] Sehingga, keluarga sebagai *home* akan menerima bimbingan guna menghadapi dunia persekolahan. *Homeschooling* merupakan salah satu dari berbagai alternatif model pendidikan yang diciptakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem pendidikan sekolah yang memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisir dengan mencoba untuk mengkombinasikan model alternatif *homeschooling* dengan sistem pendidikan. Pengkombinasian tersebut tidaklah mustahil dilakukan mengingat bahwa kedua sistem tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama bertujuan pencapaian terbaik bagi anak-anak.

Di era dimana setiap orang tua terpacu untuk mengejar kesuksesan berkarir secara profesional yang kemudian hanya menyisakan waktu yang minim untuk anak-anaknya, menjadikan *homeschooling* menjadi sangat sulit diterapkan. Namun, dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, model *homeschooling* perlu cara lain untuk diterapkan. Sebagai sistem pendidikan yang telah dikenal

[9] J.I.G.M. Drest, *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas, sangat memungkinkan sekolah menggunakan model *homeschooling*. Dengan demikian, kelemahan dan kelebihan kedua sistem ini dapat saling menutupi.

Pengkombinasian sistem sekolah dengan *home schooling* dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan-pendekatan *homeschooling* pada sistem sekolah. Pendekatan-pendekatan *homeschooling* yang dapat diterapkan pada sistem sekolah untuk mengkombinasikan sekolah dan *homeschooling* antara lain:[10]

1. *Unit Studies Approach*

   Unit studies approach merupakan pendekatan *homeschooling* dengan mengangkat satu tema untuk semua mata pelajaran. Sebagaimana telah dicontohkan sebelumnya, tema rumah dijadikan bahan pengajaran bagi siswa. Dari tema rumah tersebut dapat dijadikan bahan pelajaran matematika (geometri), sejarah (jenis-jenis rumah), sains (fungsi rumah), IPS (profesi pembuat rumah), dan lainnya.

   Tema-tema yang diangkat dalam pendekatan ini hendaknya merupakan tema-tema yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, maka siswa akan lebih mudah memahami tema dan mata pelajaran yang mengiringnya. Untuk tema-tema yang siswa tidak terlalu dekat dengannya, namun memungkinkan untuk diberikan, pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dengan pendekatan *the living books approach*. Misalnya, tema pesawat, maka

[10] http://jawala.blogspot.com/2009/03/penerapan-*homeschooling*-di-sekolah.html.Diakses tanggal 09 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswa dapat di ajak langsung ke tempat pembuatan pesawat atau ke bandar udara.

Pendekatan ini sangat menuntut kreatifitas dari seorang guru. Selain itu, komunikasi secara intensif perlu dilakukan antar guru tiap mata pelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi ketersambungan antara tema yang akan diangkat dengan bahan ajar guru. Pendekatan ini juga akan memacu guru untuk selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas pengajarannya.

2. *The Living Books Approach*

The living books approach merupakan pendekatan *homeschooling* dengan metode pendidikannya melalui pengalaman dunia nyata. Pendekatan ini dilakukan dengan mengajarkan kebiasaan baik (*good habit*), keterampilan dasar (membaca, menulis, berhitung), serta mengekspos anak dengan pengalaman nyata, seperti berjalan-jalan, mengunjungi museum, berbelanja ke pasar, mencari informasi di perpustakaan, menghadiri pameran, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendekatan ini memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Sehingga, sebagian sekolah telah menerapkan pendekatan ini. Bahkan, pada kurikulum terbaru (KTSP) ada penilaian pada sisi praktek siswa.

Program seperti "*market day*" yang banyak dilakukan di beberapa sekolah misalnya, sangat positif dalam pengembangan pendekatan ini. Dengan program seperti ini, siswa dapat dikenalkan secara langsung tentang proses pasar sebagai bagian dari mata pelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IPS, sekaligus sarana penanaman *good habit* berupa kemandirian dan jiwa wirausaha bagi siswa.

Selain kedua pendekatan tersebut, penerapan *homeschooling* di sekolah juga dapat dilakukan dengan pelibatan secara aktif dalam proses belajar mengajar anak. Kerja sama secara aktif antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam hal ini perlu diintensifkan. Kerja sama tersebut dapat berupa tukar informasi antara sekolah dan orang tua berkaitan tentang kondisi anak. Sangat dimungkinkan bahwa ada informasi-informasi tertentu tentang diri siswa yang tidak diketahui oleh sekolah namun diketahui oleh orang tua, demikian pula sebaliknya ada informasi tertentu yang diketahui sekolah namun tidak diketahui orang tua. Informasi-informasi tersebut yang kemudian perlu saling diklarifikasikan.

Home visit merupakan salah satu cara yang mungkin dilakukan oleh sekolah sebagai sarana pertukaran informasi-informasi tersebut. Cara-cara lain haruslah dapat menjamin keterlibatan aktif orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Keterlibatan tersebut penting, sebab secara umum orang tua menjadi orang yang paling banyak berinteraksi dengan anak, sehingga lebih banyak mengetahui kondisi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan anaknya.

E. Kelebihan dan Kekurangan *homeschooling*

Berdasarkan pada persamaan dan perbedaan *home schooling* dan sekolah, maka dapat diketahui kelebihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kekurangan dari *homeschooling* (Simbolon dalam wordpress.com).[11] Beberapa kelebihan *homeschooling* dibandingkan dengan sekolah antara lain: *Pertama, adaptable*, artinya sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga. *Kedua*, mandiri adalah lebih memberikan peluang kemandirian dan kreativitas individual yang tidak didapatkan di sekolah umum. *Ketiga,* potensi yang maksimal artinya dapat memaksimalkan potensi anak, tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan sekolah. *Keempat,* siap terjun pada dunia nyata (*real world*) karena proses pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitarnya.*Kelima,* terlindung dari pergaulan menyimpang. Ada kesesuaian pertumbuhan anak dengan keluarga. Relatif terlindung dari hamparan nilai dan pergaulan yang menyimpang (tawuran, narkoba, konsumerisme, pornografi, mencontek dan sebagainya). *Keenam,* ekonomis, biaya pendidikan menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga. *Ketujuh.* kemampuan bergaul dengan orang tua dan yang berbeda umur (*vertical socialization*).

Adapun beberapa kekurangan yang dimiliki oleh *homeschooling* dibandingkan dengan sekolah antara lain: *Pertama,* membutuhkan komitmen dan tanggung jawab tinggi dari orang tua.*Kedua,* memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena orang tua harus bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan anak. *Ketiga,* keterampilan dan dinamika bersosialisasi dengan teman sebaya (*peer-*

[11]P. Simbolon, 2007. *Homeschooling: Sebuah Pendidikan Alternatif*, www. wordpress.com.Diakses 08 Mei 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

group socialization) relatif rendah.*Keempat,* ada resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim (*team work),* organisasi dan kepemimpinan.*Kelima,* proteksi berlebihan dari orang tua dapat memberikan efek samping ketidak-mampuan menyelesaikan situasi dan masalah sosial yang kompleks yang tidak terprediksi. *Keenam,* pelaksanaan *homeschooling* masih mengutamakan bisnis dan pelak-sanaannya belum berjalan secara optimal karena subjek *homeschooling*belum mengetahui kurikulum secara jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEBIJAKAN KURIKULUM 2013; Kurikulum Tematik-Integratif untuk Membangun Karakter Peserta Didik

Oleh:
Mo'tasim

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (19) berbunyi: "Kurikulum adalah seperangkat rencana serta pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".[1] Perkembangan dan tantangan zaman mengakomodir agar kurikulum bersifat dinamis, luwes, dan tidak kaku. Majunya peradaban suatu bangsa, maka semakin berat pula tantangan yang dihadapinya. Persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah internasional, berakibat pada penemuan-penemuan baru dan kecanggihan dalam semua dimensi kehidupan. Sehingga semua negara di dunia berbondong-bondong untuk meningkatkan persaingan global. Khususnya Indonesia negara yang kita cintai agar mampu menjunjung peradaban dan martabat bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan baru dalam dunia pendidikan, kurikulum sebagai hal yang penting dan jantung dari pendidikan suatu negara perlu membenahi kinerja pendidikan yang jauh tertinggal dengan negara-negara maju di dunia.

[1] Sisdiknas No 20 tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan Kurikulum 2013

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, man-diri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan di Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika, salah satunya adalah perubahan kurikulum. Baru-baru ini Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengeluarkan kebijakan baru penerapan Kurikulum 2013 untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kurikulum ini nantinya akan menggantikan kurikulum yang sudah diberlakukan saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Tujuannya untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi pelajaran. Obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

A. Pengertian Kurikulum 2013

Kurikulum *(curriculum)* secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang berarti pelari, dan *currere* yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari *start* hingga *finish*.[2] Istilah kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kurikulum memiliki beberapa aspek penting seperti perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun.[3]

Kurikulum menurut Ronald C. Doll adalah keseluruhan pengalaman yang ditawarkan kepada peserta

[2] Rahmat Raharjo Syatibi, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Yogyakarta: Azzagrafika, 2013), 17.

[3] Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta,: Prenada Media Group, 2011), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah.[4] Pada Kurikulum 2013 bimbingan sekolah lebih mengutamakan pada pemahaman, skill dan pendidikan berkarakter. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang melakukan tematik-integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan pengamatan, bertanya, eksplorasi, bernalar dan menkomunikasikan.

Menurut Dede Rosyada kurikulum merupakan inti dari sebuah penyelenggaraan pendidikan.[5] Pada kurikulum 2013 siswa dituntut untuk menguasai materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu. Manakala Kurikulum 2013 diterapkan dan ditujukan agar guru memperoleh ruang yang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi siswa, maka kurikulum ini harus dikawal dengan kebijakan yang sinergis. Sehingga siswa dapat belajar dengan semangat, antusias, tidak bosan dan mampu menyerap nilai-nilai moral yang terkandung secara tersirat dalam setiap materi.[6]

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikum

---

[4] Ronald. C. Doll, *Curriculum Improvement, Decision Making and Process* (Boston: Alyyn and bacon, 1994). 15.

[5] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 26.

[6] Mulyoto, *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulm 2013* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2013), 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter.[7] Dengan tujuan siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu.

B. Konsep Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah: (a) Menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual) karena berfokus dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing, (b) Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, (c) Penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu, (d) Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan

[7] E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.[8]

Pelaksanaan kurikulum 2013 dilaksanakan melalui pendekatan scientific. Pada pelaksanannya pendekatan ini menekankan pada lima aspek penting yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan komunikasi.

1. Mengamati

   Proses mengamati dilakukan siswa terhadap masalah yang diajarkan. Guru dituntut untuk memahami materi sebelum menghadirkan siswa ke dunia nyata dengan mengamati sendiri fenomena yang terjadi. Proses mengamati ini sangatlah penting dimana siswa menghadirkan angan menjadi nyata. Siswa tidak lagi mengkhayal dalam setiap pembelajaran, siswa sudah melihat langsung proses percobaan yang dituntun guru sebelum mencoba.
2. Menanya

   Proses bertanya sudah bukan lagi menjadi hal baru. Siswa yang tidak berani bertanya akan diam terpaku. Siswa yang aktif bertanya akan terus menanyakan masalah yang tidak diketahuinya. Siswa yang aktif inilah yang dituntut dalam kurikulum 2013. Hal ini dilakukan guru dengan membuka pembelajaran dengan menimbulkan masalah. Siswa berhak bertanya apapun masalah yang tidak diketahuinya agar jelas. Pertanyaan siswa akan mengukur sejauh mana kemampuan mereka menyerap materi yang diajarkan.

[8] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mencoba

   Pelaksanaan kurikulum 2013 menuntut siswa untuk mencoba sendiri, ikut terlibat langsung dalam masalah yang dihadirkan guru. Mencoba akan membuat siswa sadar bahwa materi ajar penting dalam kehidupan mereka sehari-hari bukan lagi mengajari nilai. Siswa yang mencoba akan paham bahwa materi yang diajarkan guru berguna untuk mereka.

4. Menalar

   Bagian ini siswa dituntut untuk dapat memahami dengan benar pokok materi yang diajarkan guru. Pemahaman siswa tidak setengah-setengah yang kemudian menimbulkan keraguan dalam diri mereka. Proses penalaran inilah yang kemudian membuat siswa mencerna dengan baik.

5. Komunikasi

   Komunikasi dalam kurikulum 2013 adalah siswa mampu mengkomunikasikan semua permasalahan. Dalam pembelajaran siswa mempresentasikan hasil kerja mereka. Dalam hal agama siswa bisa maju ke depan kelas mempraktekkan tata cara sholat dan lain-lain. Sehingga siswa mampu memahami dan menjalankan materi ajar dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum 2013 dirancang dengan memiliki karakteristik sebagai berikut :[9]

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas,

[9] Kemenag RI, Peraturan Kemenag Kurikulum 2013 Nomor 000912 Tahun 2013. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.

2. Madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
3. Memberikan waktu cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, ketrampilan dan pengetahuan.
4. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
5. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dijenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual.

C. Landasan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.[10] Dan berikut ini merupakan landasan atau dasar Kurikulum 2013:

[10] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut :[11]

a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan menjadi kepedulian kurikulum, hal ini menunjukkan bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kedidupan generasi muda di masa depan. Untuk mempersiapkan kehidupan saat ini dan masa depan peserta didik, kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan

[11] Kunandar, *Penilaian Autentik Kurikulum 2013* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan di masa kini dan masa depan. Pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang perduli terhadap kemaslahatan umat.

b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini prestasi anak bangsa diberbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berfikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasakan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologi serta kematangan fisik seserta didik. Selain megembangkan kemampuan berfikir rasional dan cemerlang dalam akademik, kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, interaksi sosial di masyarakat sekitarnya dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.

d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Dengan membekali berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dengan filosofi ini, kurikulum 2013 bemaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berfikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi intelegensi yang sesuai dengan diri peserta didik.

2. Dasar Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar (*standar-based education*) dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competensi-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan dan bertindak.

3. Landasan Empiris

   Dewasa ini kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut berasal dari kurikulum, namun para ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum. Yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu kurikulum 2013 ini hadir untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional.

4. Landasan Konseptual

   Kurikulum 13 ini diberlakukan untuk memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dua dimensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga akan mendeskripsikan landasan konseptual dari K-13, di antaranya: [12]

a. Relevansi pendidikan
b. Pembelajaran kontekstual
c. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
d. Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh.
e. Pembelajaran aktif

5. Dasar Yuridis

Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU no. 32 tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan secara terpadu. Hal ini sesuai amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 yang berbunyi: "Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati". [13]

Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah :

a. Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
b. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
c. Undang-Undang nomor 17 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional,

[12] E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013),65.

[13] UU Republik Indonesia tentang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 (Bandung: Fermana, 2006), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beserta segala ketentuan yang dituangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

D. Tujuan Kurikulum 2013

Dalam rangka mewujudkan kondisi di atas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembaharuan dan inovasi dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah pembaharuan dan inovasi kurikulum, yakni lahirnya kurikulum 2013. Lahirnya kurikulum 2013 ini untuk menjawab tantangan dan pergeseran paradigma pembangunan dari abad-20 menuju abad ke-21. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga yang beriman, produktif, kretif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.[14]

[14] Muhammad Nuh, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Kelas IV* (Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusunan kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan acuan kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah dalam mengembangkan program-progam yang akan dilaksanakan. Selain itu, kurikulum 2013 disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :

1. Belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada tuhan.
2. Belajar untuk memahami dan menghayati.
3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif.
4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain.
5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencangkup tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

E. Implementasi dan Polemik Kebijakan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan otonomi penuh kepada lembaga sekolah itu sendiri untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Sedangkan kurikulum 2013 mencoba kembali pada masa pemerintahan *Mbah* Harto, yaitu kurikulum dikendalikan oleh pemerintah atau bersentral pada pemerintah. Jadi, guru tidak disibukkan lagi dengan tugas harus membuat silabus dan RPP, karena guru harus lebih berfokus pada bagaimna proses pembelajaran dan transformasi ilmu bisa maksimal.

Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter harus melibatkan semua komponen *(stake-holders),* termasuk komponen-komponen sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, sesuai dengan standart kompetensi pada setiap jenjang pendidikan.

Implementasi kurikulum 2013 menuntut adaptasi dari berbagai pihak. Mulai dari guru, murid maupun orang tua. Dalam kurikulum 2013 dikenal dengan pendekatan scientific. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembe-lajaran yang mengaktifkan siswa. Pendekatan ini paling tidak dilaksanakan dengan melibatkan tiga model pembelajaran, diantaranya problem based learning, project based learning dan discovery learning. Ketiga model ini akan menunjang how to do yang dielu-elukan dalam kurikulum 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter harus melibatkan seluruh komponen sistem pendidikan. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan sikap peserta didik. Karakter merupakan gambaran tingkah laku yang dimiliki orang. Orang yang berkarakter memiliki berbagai dimensi misalnya, dimensi sosial, fisik, emosi dan akademik. Jika disejajarkan dengan ranah Bloom berarti manusia berkarakter memiliki ranah kognisi, afeksi, psikomotorik yang baik, ditambah dengan emosi, spiritual ketahanan menghadapi masalah dan sosial.[15] Dengan demikian, perpaduan dua basis antara kompetensi dan karakter dalam kurikulum ini diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum 2013 diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1 : "Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar sampai menengah atas dilakukan secara bertahap."
2. Pasal 2 : "Implementasi kurikulum memakai pedoman yang mencakup:
   a. Pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP.
   b. Pedoman pengembangan muatan lokal.
   c. Pedoman kegiatan ekstrakulikuler.
   d. Pedoman umum pembelajaran dan

[15] Annisa Izzaty, *Inovasi dalam Bidang K13 dan Mutu Pendidikan*., dalam Http//Izzatyalmuhyi.blogspot.com diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pedoman evaluasi kurikulum.

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

1. Pemerintah bertanggung jawab mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.
2. Pemerintah bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.
3. Pemerintah provinsi bertanggung jawab melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi.
4. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten.

Pelaksanaan kurikulum di semua sekolah dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. Juli 2013: kelas I, IV,VII, dan X.
2. Juli 2014: kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI.
3. Juli 2015: kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
4. Pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan tahun 2013 – 2015.
5. Pengembangan buku siswa dan buku guru tahun 2012 – 2015.
6. Pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi dan pengembangan budaya sekolah terutama untuk SMA dan SMK dimulai bulan Januari – Desember 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dalam menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan: Juli 2013 – 2016.

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk secara profesional merancang pembelajaran efektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif serta menetapkan kriteria keberhasilan.[16]

Ada sejumlah polemik mengenai pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada pelaksanaan kurikulum 2013.[17]

No	Aspek	Tantangan	Arah Kebijakan
1.	Akses	Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi dan geografi. Daya tampung terbatas. Layanan belum merata.	Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan.
2.	Mutu & Relevansi	Sarana prasana kurang lengkap. Disparitas mutu dan distribusi guru. Pendidikan karakter belum memadai.	Meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan

[16] Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 99.

[17] Kemendikbud, *Implementasi Kurikulum 2013* (Pondok Cabe: Pess Workshop, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.	
3.	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan	konservasi produk budaya masih terbatas. Diplomasi budaya belum efektif. Regulasi bidang kebudayaaan masih terbatas.	Menuntaskan konservasi, pengembangan, diplomasi dan promosi kebudayaan.
4.	Tata kelola	Penggunaan sumber daya belum efisien Kurang akuntabel	Memastikan SDM dikelola dengan efisien.

Dalam kurikulum 2013, terdapat pendidikan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikan.

Karakter adalah tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan melekat pada diri seseorang. Orang yang berkarakter memiliki berbagai dimensi misalnya, dimensi sosial, fisik, emosi, dan akademik. Jika disejajarkan dengan taksonomi Bloom, berarti manusia berkarakter memiliki ranah kognisi, afeksi, dan psikomotorik yang baik, ditambah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emosi, spiritual, ketahanan menghadapi masalah dan sosial.[18]

Dengan demikian, perpaduan dua basis antara kompetensi dan karakter dalam kurikulum ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi tanggung jawab semua pihak. Untuk mengefektifkan program pendidikan karakter dan meningkatkan kompetensi dalam kurikulum 2013 diperlukan koordinasi, komunikasi dan jalinan kerja antara sekolah, orangtua, dan pemerintah dalam semua sisi.

Jika melihat pada sejarah pemberlakuan kurikulum sebelumnya, memang secara teoretis kurikulum ini semuanya bertujuan baik. Namun permasalahan yang sering terjadi yaitu harapan kurikulum dan kenyataan di lapangan seringkali tidak sesuai. Guru memang ujung tombak agen perubahan, namun guru tidak serta merta dapat adaptif terhadap tuntunan perubahan ini. Bagaimanapun harus ada keseriusan dan kesinambungan bahwa guru bukan satu-satunya sosok penanggung jawab sentral akan keberhasilan Kurikulum 2013. Hal ini karena penerapan sistem pendidikan nasional adalah mata rantai dimana dibutuhkan "kerja sama tim" yang padu. Jangan sampai pendidikan

[18] Anisah Izzaty, Inovasi dalam Bidang Kurikulum 2013 dan mutu Pendidikan.,dalam *http//Izzatyalmuhyi.blogspot.com* (on line) diakses pada tanggal 16 April 2015 Pukul 20.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kembali seperti labirin, dimana apapun kurikulumnya, masalahnya itu-itu juga.[19] Sudah waktunya Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang fokus menggarap pendidikan sebagai sumber peradaban penting bagi terbentuknya insan-insan yang mampu menghadapi tuntutan zaman yang serba cepat ke arah perubahan yang lebih baik. Jika guru sudah memahami dan mampu mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan baik maka diharapkan akan dihasilkan output pendidikan yang kompeten.

F. Kelebihan dan Kelemahan kurikulum 2013

Sebagai sebuah dokumen kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum.

Dalam Bahan Uji Publik Kurikulum 2013, proses pembelajaran dirancang berpusat pada peserta didik *(student centered active learning)* tidak lagi berpusat pada guru *(teacher centered learning)*. Dan menerapkan sifat pembelajaran yang kontekstual. artinya guru tidak hanya beracuan pada buku teks saja tetapi juga harus mampu mengkaikan materi yang disampaikannya secara kontekstual. Untuk itu, penulis sedikit menguraikan kelebibihan dan kekurangan K-13, di antaranya:

1. Kelebihan Kurikulum 2013
   a. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus

[19] Mulyoto, *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulm 2013* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2013), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan.

b. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi merupakan dasar pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu.
c. Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.
d. Lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan kesemua program studi.
e. Asumsi dari Kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus menerus.

2. Kelemahan Kurikulum 2013
   a. Pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013.
   b. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN) masih diberlakukan.
   c. Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat, karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda.[20]

Dunia pendidikan di Indonesia memang tidak pernah lepas dari dinamika perubahan, salah satunya adalah perubahan kurikulum. Kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Tujuannya untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima

[20] Sofan Amri, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi pelajaran. Obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GENDER DALAM REALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh:
Zainal Alim dan Anif Nur Chasanah

A. Definisi Gender

Gender merupakan istilah bahasa inggris, memang dalam istilah inggris tidak diketahui secara jelas perbedaannya antara pengertian *gender* dan *sex*, sering kali gender disamakan dengan seks. Kedua terminologi ini sering kali dianggap sama secara konseptual. Oleh karena itu, dalam kajian gender perlu diketahui dan dipahami perbedaan konsep gender dan seks (jenis kelamin) untuk membahas lebih lanjut. Kesalahan dalam memahami kedua makna tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sikap menentang atau sulit bisa menerima analisis gender dalam memcahkan masalah ketidakadilan sosial.

Dalam al-Qanun yang berjudul,*Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam,* Gender diartikan tidak sama dengan Sex. Misalnya Seorang Perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki iu kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat ini bisa berubah dan bertukar dari turun waktu ke waktu dan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya pada zaman dahulu perempuan lebih kuat dari laki-laki.[1]

Pengertian seks (jenis kelamin) adalah pembedaan dua jenis kelamin manusia secara biologis. Misalnya, manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki jakun dan menghasilkan sperma, dan manusia yang berjenis kelamin perempuan memiliki alat reproduksi, memproduksi sel telur, rahim, dan lain sebagainya.[2] Alat-alat yang bersifat biologis tersebut tidak bisa dipertukarkan anatara yang dimiliki oleh perempuan dan yang dimiliki oleh laki-laki. Secara permanen tidak dapat berubah dan merupakan ketentuan biologis atau yang sering disebut dengan kodrat atau ketentuan Tuhan.

Sedangkan gender berasal dari Kata "Jender" dalam bahasa Inggris, *gender*, berarti "jenis kelamin", Sedangkan Istilah menurut "*Webster's New Wold Dictionary",* diartikan Sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku."[3] Jadi Gender ialah tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang berasal dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.[4] Memang, dalam artinya gender bermakna jenis kelamin namun gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang tidak disebabkan

---

[1] Al-Qanun; *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. (*Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,2005).736-737

[2] Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2008), 2.

[3] Hasbi Indra,*Potret Wanita Shalehah.*(Jakarta:Permadani (2004),242

[4] Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender : Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan baik oleh laki-laki atau perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.[5] Oleh karena itu, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan antara kelas sosial ekonomi masyarakat.

Ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu gender tidak identik dengan jenis kelamin dan gender merupakan dasar dari pembagian kerja di masyarakat. Misalnya dalam mendidik anak, mengelola dan membersihkan rumah dianggap sebagai kodrat wanita padahal kenyataannya beberapa hal tersebut merupakan peran gender yang jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan dilakukan oleh laki-laki.[6] Jadi, gender adalah bentuk sosial yang bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, ekonomi dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan seks merupakan kodrat Tuhan yang berlaku sepanjang masa dan tidak dapat diubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

B. Gender dalam Dunia Pendidikan Nasional

Dilihat dari sejarah masa lalu, para penjajah tidak memperlakukan perempuan dengan sewajarnya dan berlaku sewenang-wenang, ini masih menandakan bahwa persamaan gender belum ditegakkan. Didalam pendidikan, harusnya perempuan juga mendapatkan pendidikan yang setara

[5] Umi Sumbulah, *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*, (Malang : UIN Maliki Press, 2008), 6.

[6] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan laki-laki. Ada beberapa ketimpangan gender dalam dunia pendidikan yaitu perempuan cenderung memiliki kesempatan yang lebih kecil dan lebih sempit daripada laki-laki dalam jenjang pendidikan. Hal ini juga bisa diamati dalam buku pelajaran, kebanyakan perempuan diletakkan dalam peran domestik tetapi laki-laki diposisikan dalam peran-peran publik.[7]

Badriyah Fayuni dalam bukunya *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam),* mengatakan bahwa pengertian pengertian jender tidak sekedar merujuk pada perbedaan perilaku, sifat dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki laki dan perempuan.yang mana gender lebih merujuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.[8]

Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa faktor dari kesenjangan gender tidak disebabkan dari satu faktor saja tetapi dari beberapa faktor. Setidaknya ada empat faktor, yaitu[9] :

1. Faktor akses
   a. Penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran cenderung bias laki-laki
   b. Adanya keterbatasan akses bagi perempuan untuk menjadi guru di tingkat SMP ke atas

---

[7] Edi Susanto, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)", *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4 :, no.1 (2009). Hal. 142

[8] Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI,2001),57.

[9] Sumbulah, *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* , 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

   c. Penulis buku pelajaran masih dominan laki-laki hampir 85%
2. Faktor partisipasi
   a. Partisipasi rendah bagi perempuan untuk berpendidikan yang lebih tinggi dikarenakan beberapa faktor yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana, biaya pendidikan yang lebih tinggi, dan adanya norma yang berlaku di masyarakat seperti anak perempuan tidak harus berpendidikan tinggi karena mereka hanya diperlukan untuk membantu orang tua di dapur.
   b. Partisipasi perempuan dalam pengajaran masih dipengaruhi oleh stereotype, seperti guru olahraga yang dominan guru laki-laki
   c. Partisipasi orang tua murid juga masih berperan streotipe, seperti peran pengambilan keputusan di sekolah masih didominasi laki-laki, sedangkan peran menjemput anak, mengambil rapot didominasi oleh perempuan
3. Faktor kontrol
   a. Kesempatan untuk memperoleh jabatan strategis struktural masih sangat kecil untuk perempuan karena masih didominasi oleh laki-laki
   b. Kepengurusan Komite Sekolah terutama peran pengambilan keputusan masih didominasi laki-laki
4. Faktor benefit
   a. Jabatan-jabatan akademis kependidikan dan posisi strategis masih didominasi oleh laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, saat ini pemerintah telah menegakkan kesetaraan gender. Hal ini terbukti adanya program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan banyak penerus bangsa sebagai estafet pembangunan Indonesia. Indonesia memperoleh kesempatan pendidikan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Pandangan orang tua yang dulunya berpikiran kolot untuk tidak menyekolahkan anak perempuannya, kini sudah mulai berubah. Terbukti saat ini banyak kaum perempuan mengenyam pendidikan tinggi. Selain untuk mendapatkan pendidikan, dalam tatanan organisasi pun pemerintah sudah melakukan penyetaraan gender, perempuan memiliki hak untuk menduduki jabatan yang sama dan peran yang sama seperti laki-laki, misal Ibu Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai presiden Indonesia.

C. Gender dalam Kebijakan Pendidikan

Memperjuangkan kesetaraan bukanlah dengan membedakan jenis kelamin tetapi lebih kepada membangun hubungan yang setara. Mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan. Diperlukan langkah-langkah yang konkrit untuk segera ditindak lanjuti yaitu dengan mencanangkan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Ada tiga tujuan pokok dalam kebijakan tersebut diantaranya:

1. Membuka kesempatan yang sama dan lebih merata pada semua jurusan, tingkat pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menegeliminasi semua bentuk diskriminasi gender pada jurusan atau program studi di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi sehingga terbentuk kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian.
3. Membuka peluang kepada kaum perempuan agar berpartisipasi secara optimal pada semua bidang pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sampai pada tahap evaluasi.

Untuk mencapai tujuan pokok tersebut, perlu ditingkatkan adanya tenaga kependidikan dan jumlah guru atas dasar kesetaraan gender pada semua tingkat pendidikan dengan adanya pelatihan-pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dan juga diperlukan standardisasi buku ajar yang salah satunya berwawasan gender. Berikut kebijakan-kebijakan konkrit mengenai keadilan gender diantaranya :

1. Kemendiknas, Kemenag, dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan.
2. Didalam UU Republik Indonesia No.7 tahun 1984 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita pada bagian III pasal 10 yang berisi [10]:

[10]Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), 16-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita, guna menjamin hak-hak yang sama dengan pria di bidang pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita :

a. Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam semua jenis lembaga pendidikan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian teknik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan.
b. Ikut serta pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama.
c. Menghapus tiap konsep yang streotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan koedukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar.
d. Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan dana pendidikan yang lain.
e. Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program yang ditujukan pada pengurangan sedini, mungkin, tiap kesenjangan antara pria dan wanita dalam pendidikan.

f. Mengurangi angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak-anak-anak perempuan dan wanita yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.
g. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani.

3. Didalam UU Republik Indonesi No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pada bagian kesembilan mengenai hak wanita pasal 48 dijelaskan bahwa:
   Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.[11]
4. Kemendiknas dan Kemenag menyediakan buku teks pelajaran yang berbasis gender pada semua tingkatan pendidikan dan akses yang sama terhadap kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seni, dan sains.[12]
5. Mempercepat program yang terkait akses pendidikan dan memprioritaskan propinsi yang memiliki kesenjangan gender dalam indikator pendidikan. Hal ini termasuk program sekolah satu atap (gabungan SD dan SMP), sekolah kecil, sekolah satelit di daerah miskin dan terpencil dan program bantuan langsung tunai

[11] ibid, 95.
[12] http://www-wds.worldbank.org/external/default/wdscontentserver/wdsp/ib/2013/08/22/000442464_20130822114553/rendered/pdf/730310revised00sa0gender0brief030bh.pdf. Diakses pada 7 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersyarat.[13] Peningkatan cakupan dan kualitas program pemerataan (paket A, B, dan C) khususnya jika disparitas rasio gender terjadi pada angka putus sekolah. Perlu juga dilaksanakan kajian untuk melihat efektifitas skema yang diterapkan untuk mengatasi kesenjangan gender.

[13] http://www.academia.edu/7435602/makalah_pemikiran_pendidikan_kontemporer_gender_dalam_pendidikan. Diakses pada 29 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

Oleh:
Abdullah

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, guru pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mempunyai posisi sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, menengah atas, dan pendidikan anak usia dini.

Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1), atau (D-IV) yang dibuktikan dengan ijasah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Memiliki kompetensi yang meliputi pedagogik, spritual, profesional, sosial dan kepribadian, sehat jasmani dan rohani, Lebih lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui sertifikasi, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[1]

A. Sertifikasi Dan Peningkatan Profesionalias Guru

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikat berasal dari bahasa Inggris *certificate* yang memiliki arti sebuah pernyataan tentang kualifikasi seseorang atau barang. Terkait sertifikat pendidik adalah suatu pernyataan yang membuktikanbahwa seseorang benar-benar memiliki kualifikasi pendidik, atau kualifikasi guru profesional. Dinyatakan dalam UU No.14 Tahun 2005 Pasal 8 ketentuan karakteristik guru profesional adalah: ”Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani,serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”[2]

Sertifikasi pendidik pada realitanya adalah sebagai upaya untuk menjamin bahwa setiap guru yang bertugas dapat dijamin kualifikasi dan kompetensinya. Baik itu kompetensi pedagogik, kepribadian, kemampuan sosial, maupun kompetensi profesionalnya. Dengan istilah lain guru yang bersertifikasi adalah guru yang kompetensinya dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademik, profesional, maupun pedagogik.

---

[1] Diklat Profesi Guru,*Bahan Ajar PLPG Sertifikasi Guru/Pengawas dalam Jabatan* (Surabaya: LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2009), 04.

[2] Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas Media, 2008), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lembaga yang Berwenang Memberi Sertifikat

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 11 ayat (2) tentang Guru dan Dosen tertulis: ”Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.”

Membincang ketentuan undang undang tersebut sangat jelas bahwa Universitas yang memiliki LPTK memiliki wewenang menguji guru dan menilai untuk memperoleh sertifikat pendidik. Jelaslah bahwa hanya lembaga pendidikan yang memiliki tenaga akademik dan profesional, wilayah studi dan kajiannya dibidang kependidikan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sertifikasi. Setiap LPTK yang melaksananakan proses sertifikasi perlu memilih:[3]

a. Lembaga sekolah yang dijadikan tempat calon guru profesional berpraktek sebagai guru
b. Memilih guru-guru profesional sebagai tenaga pengajar luar biasa LPTK sebagai tim yang terus menerus melakukan pengawasan dan asesmen terhadap kinerja calon guru profesional.
c. Membentuk tim dosen dari multidisiplin ilmu yang terus memantau dan bekerja sama dengan para guru dosen luar biasa di sekolah.

B. Profesionalitas Guru

1. Pengertian Profesionalitas

Secara bahasa profesi dari kata *profession* yang memiliki arti pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan

[3]Ibid., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan secara husus. Sedangkan *Professional* memiliki arti orang yang ahli. Profesionalisme artinya memiliki sifat profesional. Dalam kamus bahasa Indonesia profesi adalah pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (kejuruan dan keterampilan) seacara husus.

Profesional adalah (1) berkaitan dengan profesi, (2) yang memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya yang diharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalitas adalah suatu panggilan serta komitmen pada kualitas tindakan dan sikap dari para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian untuk dapat meningkatkan kualitas profesionalnya dalam melakukan tugas-tugasnya.

Profesional dalam undang-undang No 14 tahun 2005 bab 1 pasal1 ayat 4 digambarkan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang sumber penghasilan dalam memenuhi biaya kehidupanya memerlukan keahlian,serta kemahiran yang memenuhi standart mutu dan norma tertentu yang memerlukan pendidikan profesi.Dari berbagai definisi diatas tergambar bahwa dalam profesi diperlukan tehnik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara husus,sehingga bisa digunakan untuk kepentingan orang lain. Dalam hal ini seorang pekerja profesional bisa dibedakan dari seorang pekerja amatir walaupun sama-sama memiliki dan menguasai sejumlah tehinik dan prosedur kerja tertentu,seorang pekerja profesional memilki filosofi dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat Profesi

Semua pekerjaan tidak bisa disebut profesi karena setiap orang bisa memiliki pekerjaan,namun tidak semunya bertumpu pada profesi. Hanya saja profesi bagian dari pekerjaan yang memiliki mikanisme dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi disebut profesi.Menurut Syarifudin Nurdin ada sepuluh kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar disebut sebagai profesi yaitu:[4]

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu
2. Pengetahuan dan keahlian secara husus
3. Memiliki teori yang baku secara universal
4. mengabdi pada kepentingan masyarakat
5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
6. Memegang otonomi dalam melaksanakan profesinya
7. Kode etik atau norma, asas yang berlaku
8. Klien yang jelas
9. Berperilku ebagai pendidik
10. Berbuat sebagai wujud kesadaran dari kewajiban.

C. Hubungan Sertifikasi dan Peningkatan Profesionalitas Guru

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar pendiaikan Nasional disebutkan bahwa Guru adalah pendidik yang profesional, karena itu guru diharuskan memiliki kulifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV (SI/D-IV) yang sesuia atau

[4] Nur Hamim, *Bahan Ajar PLPG Sertifikasi Guru/Pengawas dalam Jabatan* (Surabaya: LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2011), 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan serta memiliki kompetensi sebagai perangkat pembelajaran.

Program sertifikasi guruadalah program pemberian penghargaan sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi tersebut, karena itubuku sebagai acuan atau pedoman sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portopolio (Dirjen Dikti Depdiknas, 2008) menyatakan secara tersurat bahwa program sertifikasi guru ini bertujuan: (1)menentukan kelayakan guru dalam bertugas sebagai pelaku proses pembelajaran; (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pembelajara; (3) meningkatkan kesejahteraan guru; (4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu; (5) meningkatkan profesionalitas guru.

Seorang guru yang bisa mengikuti sertifikasi melalui dua jalur ada jalur portopolio dan jalur pendidikan dalam bidang studi tertentu, akan dinilai dari berbagai aspek yaitu: latar belakang pendidikan (ijazah), masa kerja, prestasi akademik, aktifitas lain yang menunjang serta masih berkaitan dengan proses belajar mengajar ataupun penilaian kinerja secara personal dalam PLPG. Dokumen portopolio idealnya merepresentasikan personal kita sebagai guru yang:

1. Memilki ijazah yang sesuai bidang studi yang diajarkan.
2. Memilki masa kerja (jam pengalaman) yang cukup layak sebagai guru.
3. Memilki profesi akademik yang cukup memadai sesuai dengan bidang yang digeluti.
4. Memilki aktifitas lain dalan bidang pendidikan atau kemasyarakatan secara proporsional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat hal diatas mencerminkan indikator guru sebagai pekerja yang profesional, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, memiliki wawasan, keperibadian, keahlian/keterampilan/ jalur tertentu yang memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya, adanya penghargaan untuk melakukannya.

Sertifikasi pendidik pada dasarnya adalah cara untuk menjamin kualifikasi dan kemampuan guru yang bertugas. Baik kemampuan pedagogik, kepribadian, kemampuan sosial, maupun kemampuan profesionalnya. Sedangkan profesionalitas adalah suatu identitas terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta kualitas pengetahuan dan keahlian yang dimiliki mampu melakukan tugas-tugasnya sacara profesional. Guru itu sendiri adalah pendidik profesional, karena itu guru diharuskan memiliki kulifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV (SI/D-IV) serta memiliki kompetensi sebagai pelaku pembelajaran. Program sertifikasi guru merupakan program penghargaan dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NEGARA DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh:
Moh. Ismail dan Juli Amalia Nasucha

Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat-tempat pedidikan dan latihan. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya yang berbentuk madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia. Dari beberapa dekade pemerintahan, seperti orde lama, orde baru hingga orde reformasi.

Masa orde lama dalam hal ini ialah rentang tahun 1945 sampai tahun 1965, yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk mengupayakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dalam skala nasional. Oleh sebab itu, masa orde lama telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa itu. Karena pemerintahan memandang bahwa agama memiliki kedudukan dan peran sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan suatu Negara. Sehingga, terdapat beberapa usaha yang dilakukan pengelola Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah yang di antaranya adalah dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945.[1]

Hal tersebut diperkuat lagi dengan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pendidikan Islam, di antanya: *Pertama*, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Namun kolonialisme belum berhenti, penjajah berusaha untuk kembali ke Indonesia. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa mengumandangkan jihad *fi sabilillah* terhadap Belanda dan Sekutu. *Kedua*, pada tanggal 3 Januari 1946 didirikan Departemen Agama, di mana tugasnya mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurusi sekolah agama, seperti madrasah. *Ketiga*, pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat hingga kelas VI.[2]

Hal tersebut dilajutkan pada masa berikutnya, yakni masa Orde Baru. Rezim ini dimulai 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibi pada 21 Mei 1998. Di awal masa orde baru ini, kebijakan terkait pendidikan Islam (dalam hal ini adalah madrasah) bersifat melanjutkan kebijakan orde lama. Pada fase ini, madrasah belum dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan

[1] Dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat termaktub : "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, hendaknya mendapat perhatian dan bantuan nyata tututan dan bantuan material dari pemerintah selaku pengelola Negara."

[2] Meskipun pada era tersebut keadaan keamanan di Indonesia masih belum mantap sehingga SKB Dua Menteri belum dapat berjalan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia, namun hanya bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah Menteri Agama.

Sehingga, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk dilakukan, yang salah satunya adalah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 1967, yang berfungsi sebagai respons yang positif terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966. Dan pada dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Pemerintah selanjutnya menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989.

Hal tersebut kemudian dilanjutkan lagi pada masa reformasi. Pada masa ini, pemerintah memberikan peluang yang lebih besar lagi pada lembaga pendidikan Islam. Pasalnya, lembaga pendidikan Islam pada masa ini mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan sekolah pada umumnya. Hal ini, kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya undang-undang tentang guru dan dosen pada tahun 2003 yang didalamnya juga telah membahas pendidikan Islam.

A. Pandangan Negara terhadap Pendidikan Islam

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial-budaya, hingga pengaturan dan pelaksanaan pendidikan. Semua yang menyangkut aktivitas masyarakat dalam suatu Negara tersebut, diatur dan ditetapkan oleh kepala Negara yang berada di wilayah tersebut.[3] Negara adalah organisasi politik dari kekuasaan politik, sehingga

[3] Sjacrhan Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 33-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, dengan cara menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama, termasuk didalamnya adalah unsur pendidikan.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama, menurut penuturan sejarah, masuknya Islam ke Indonesia, mereka masuk dengan damai, dengan melalui beberapa kultur, seperti perdagangan, perkawinan dan bahkan pendidikan.[4]

Pemaknaan dari pendidikan Islam itu sendiri, adalah kegiatan pengajaran dengan sasaran utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan ke-Islaman dan menanamkan sikap hidup beragama kepada peserta didik.[5] Sedangan pengertian pendidikan Islam itu sendiri, menurut Athiyah al-Abbasyi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bukan hanya mengisi otak anak dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui. Akan tetapi untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, serta menanamkan rasa ke utamaan (*fadilah*), dan membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi dan mepersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur.[6]

Di Indonesia sendiri, lembaga pendidikan Islam berkembang dengan berbagai macam ragam, yang di

---

[4] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

[5] Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2000), 153.

[6] Athiyah al-Abbasyi, *Dasar-dasar pokok pemikiran Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaranya adalah *Madrasah*,[7] *Pesantren,*[8] *Dayah*, *Rangkang,* dan *Surau* dan lain sebagainya. Beberapa nama lembaga pendidikan tersebut, merupakan lembaga pendidikan yang dikenal di Negara Indonesia.[9] Terdapat banyak sekali kajian terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut yang dilakukan oleh para kalangan sarjana. Terlepas dari perspektif yang ditawarkan dalam studi-studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan *khazanah* Islam Indonesia, yang masing telah memainkan peranannya, dan mampu untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan Negara. Untuk melaksanakan tugas pembetukan generasi yang berkualitas baik dan berkarakter, dan semua itu sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga pendidikan Islam tersebut.

---

[7] Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penamaannya diambil dari bahasa arab dari kata "*Madrasah*" yang berarti sekolah, menurut Maksum, pelajaran yang diberikan pada madrasah ini merupakan kelanjutan dari yang diajarkan di masjid-masjid yang dikenal dalam bentuk *halaqah* yang kemudian mengalami perkembangan dan membentuk pelembagaan pendidikan Islam secara formal. Lihat Maksum, Madrasah, *Sejarah dan Perkembangannya,*(Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), vii.

[8] Istilah Pondok berasal dari bahasa arab yaitu *funduq*. Lihat di Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 564. Yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Wahjoetomo, *Pesantren* (Jakarta: Rineka Cipta,1997), 70

[9] Keragaman lembaga pendidikan Islam tersebut, terjadi bukan hanya pada tingkatan kurikulum, akan tetapi juga lebih dari yang substansial, seperti kurikulum, refrensi rujukan hingga model pembelajaran yang ditetapkannya. Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20-pergumulan antara modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Respon positif Negara, terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, merupakan suatu peluang besar bagi para penyelenggara dan pelaksana lembaga pendidikan Islam, untuk dapat mengembangkan lembaga pendidikan Islam pada arah yang lebih baik, respon positif pemerintah, sebagaimana telah disepakatinya SKB tiga menteri,[10] yang tujuannya adalah untuk mensejajarkan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum, dengan menawarkan porsi muatan kurikulum masing-masing 70% berisi muatan pelajaran umum, dan porsi 30% berisi muatan pelajaran agama. Walaupun demikian, problematika pengembangan lembaga pendidikan Islam masih cukup menuai beberapa persoalan yang kemudian menuntut pemerintah dan juga pengelola serta pelaksana pendidikan Islam itu sendiri, untuk lebih keras lagi berusaha untuk meminimalisir persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Persoalan-persoalan yang muncul dalam pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah:

1. Pemahaman SKB tiga menteri tersebut yang hanya difahami secara simbolik oleh para pelaksana pendidikan Islam, sehingga 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama masih belum terlaksana dengan sepenuhnya,

[10] SKB 3 menteri tersebut diantaranya adalah menteri Agama, menteri pendidikan dan kebudayaan dan juga menteri dalam Negeri), dalam keputusan tersebut berisi diantaranya adalah (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (2) lulusan madrasah dapat melanjutkan keskolah umum setingkat lebih atas, (3) siswa madrasah dapat pindah kesekolah umum yang setingkat. Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Banyak para lulusan madrasah yang tidak sesuai dengan yang di canangkan, mereka tidak mempunyai kompetensi yang bagus dalam bidang pelajaran umum dan juga dalam bidang agama, mereka hanya akan menjadi lulusan yang serba tanggung dan tidak menyeluruh.

Melihat persoalan yang demikian, maka pemerintah menawarkan solusi alternative yang lain, yaitu dengan merumuskan sekolah keagamaan yang kemudian dikenal dengan istilah (MAPK) atau Madrasah Aliyah Program Khusus. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian yang khusus terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut diimplementasikan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah dalam konteks pendidikan Nasional.[11] Terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah yang diantaranya adalah dengan menyatakan: ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, alumni madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang stingkat lebih atas, dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat.

C. Pendidikan Islam dari Masa ke Masa

1. Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Pendidikan Islam pada masa orde lama ini, jika merujuk kepada sejarah. Maka secara umum masih dapat dikatakan bahwa, keadaan pendidikan Islam masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, dan

[11] Peraturan tersebut, tertuang dalam undang-undang pendidikan pada bab II pasa 2 tahun 1975 M. Lihat Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam,* 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah kurang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal tersebut tentunya disebabkan dominasi pergolakan politik antara pemerintah sebagai pengatur dan pelakana Negara dengan elit Islam. Sehingga menimbulkan saling kecurigaan antara pemerintah dengan elit Islam yang kemudian menyebabkan pemerntah merasa setengah hati untuk mengurusnya.

Namun, berkat usaha para elit muslim progresif, modern dan nasionalis, terutama oleh masyarakat muslim yang telah tersentuh oleh pendidikan dari Negara yang lebih maju, maka mereka melakukan komunikasi sehingga akhirnya visi, misi dan tujuan pendidikan Islam menjadi selaras dengan kebutuhan pemerintah. Akhirnya pemerintah membentuk lembaga pemerintah yang mengurusi bidang keagamaan dan pendidikan Agama beserta beberapa peraturan pemerintah terkait dengan hal tersebut.

2. Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Pada dasarnya seluruh kebijakan yang terlahir pada zaman orde baru, diarahkan untuk menopang kebijakan pembangunan dan stabilitas ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun pada kenyataannya, pendidikan Islam pada masa ode baru ini, sedikit demi sedikit, eksistensi lembaga pendidikan Islam mulai mendapatkan porsi yang lebih serius dari pemerintah.

Hal tersebut terlihat dari lahirnya SKB 3 menteri tersebut, sehingga antara lulusan pendidikan Islam dan lulusan lembaga pendidikan umum mempunyai hak yang sama. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari terjadinya pembaharuan lembaga pendidikan Islam, yang dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah madrasah dan pesantren dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam nonformal dan lain sebagainya.

3. Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

   Keadaan lembaga pendidikan Islam pada masa reformasi menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal yang di antaranya adalah:[12] kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari system pendidikan nasional, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam, program wajib belajar sembilan tahun, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional dan adanya kebijakan sertifikasi guru dan dosen yang berlaku kepada semua pelaksana pendidikan, baik negeri maupun swasta dan lain sebagainya.

D. Kondisi Objektif Pendidikan Islam dan Masa Depannya di Indonesia

Prakatek pendidikan Islam di Indonesia ini sebagaimana dijelaskan di atas, mereka mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, dari masa pemerintahan orde lama. Kemudian dilanjutkan pada periode masa orde baru, dan bahkan pada masa orde reformasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir, relaitas lembaga pendidikan Islam menunjukkan kondisi wajah yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya, salah satu indikatornya adalah jika dilihat dari sisi kuantitasnya

[12] Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang semakin tahun, semakin mengalami penambahan jumlah kuantitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini.

Hal tersebut, ditambah lagi dengan ditambahkannya mata pelajaran agama pada jenjang lembaga pendidikan umum. Bahkan bukan hanya itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan umum yang mencanangkan dan memprogram-kan pelaksanaan pondok kilat yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan dan pemahaman para siswa terhadap pendidikan Islam. Strategi yang lain adalah dilaksanakannya penyempurnaan kurikulum pendidikan Agama secara terus menerus yang dilakukan oleh lembaga pendidikan umum. Sehingga pelaksanaan pendidikan aga-ma pada sekolah umum lebih porposional dan fungsional.[13]

Berpijak dari kondisi yang demikian, maka masa pendidikan Islam di Indonesia tersebut ditentukan oleh dua factor, yang di antaranya adalah factor Internal dan factor ekternal lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Selain itu, isu demokratisasi lembaga pendidikan Islam juga dapat mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, mempunyai andil yang cukup kuat, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam, agar mereka dapat memerankan perannya di dalam kancah Negara.

[13] Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Eksistensi Pendidikan Islam Sebagai Modal Pembangunan Nasional

Secara historis, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pesantren dan madrasah, hampir sama dengan masuknya Islam pertama ke Indonesia. Islam sebagai agama dakwah yang disebarkan secara efektif melalui proses transformasi ilmu dari para ulama kepada para masyarakat (*tarbiyah wa ta'lim*, atau *ta'dib*), dalam konteks ke Indonesiaan maka tentu proses ini berlangsung melalui lembaga pendidikan pesantren.

Secara bahasa, pesantren tidak sepenuhnya merujuk pada kata dalam bahasa Arab. Istilah pelajar yang mencari ilmu bukan *murid* seperti dalam tradisi sufi, *thalib* atau *tilmidh* seperti dalam bahasa Arab. Akan tetapi santri yang berasal dari bahasa Sanskerta. *San* berarti orang baik, dan *tra* berarti yang suka menolong. Dan lembaga tempat belajar itu pun kemudian mengikuti akar kata santri dan menjadi pe-santri-an atau "pesantren".

Maka, ada empat ciri utama dalam pesantren pesantren tersebut: *Pertama*, pondok harus berbentuk asrama. *Kedua*, kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru, pendidik, dan pembimbing. *Ketiga*, masjid sebagai pusat kegiatan. *Keempat*, materi yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Dalam pandangan Hamid Fahmy Zarkasyi, Penulis Peneliti di *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization* (INSIST), dengan catur-pusat inilah, pendidikan pesantren berfungsi sebagai "*melting pot*", yaitu tempat untuk mengolah potensi-potensi dalam diri santri agar dapat berproses menjadi manusia seutuhnya *(insan kamil)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan deskripsi di atas, karakter pendidikan pesantren bersifat holistik. Maksudnya, seluruh potensi pikir dan dzikir, rasa dan karsa, jiwa dan raga dikembangkan melalui berbagai media pendidikan yang terbentuk dalam suatu komunitas yang dirancang secara integral untuk tujuan pendidikan. Di tengah gencarnya diskursus pendidikan berkarakter, pesantren justru sejak dari awal berdirinya telah mengimplementasikannya. Tujuan pendidikan pesantren seperti halnya tujuan kehidupan manusia di dunia ini, yang di antaranya adalah santri tidak hanya disiapkan untuk mengejar kehidupan dunia, akan tetapi juga mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak.

Di sisi lain, saat ini sedang banyak dikembangkan sekolah-sekolah yang diberi label Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Akan tetapi jika kita melihatnya lebih dekat, sekolah-sekolah dengan label internasional tersebut hanyalah sekolah "bertarif" internasional. Faktanya adalah sekolah bertaraf internasional yang sedang dirintis pemerintah juga dievaluasi melalui ujian nasional.

Keberadaan pondok modern Gontor adalah salah satu bukti konkret dari sekolah berstandar internasional. Tidak hanya santri wajib berbahasa Arab dan Inggris, di pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo ini, seluruh komponen pesantren wajib berbahasa asing. Gontor juga mampu menarik siswa dari luar Negeri, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunai Darussalam, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan berbagai Negara lainnya. Maka dapat disimpulkan, pondok pesantren Gontor setara dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah bertaraf internasional, mekipun tanpa simbol sekolah internasional.

Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan jauh sebelum sistem pendidikannya dipatenkan, pesantren dan para alumninya telah banyak berperan baik di Indonesia, maupun di dunia. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, tercatat nama-nama sekaliber Nuruddin ar Raniri, Hamzah al-Fansuri, Abdul Rauf al Sinkili, Syaikhona Muhammad Kholil al Bangkalani, Syekh Yusuf al Makassari, Abdussamad al-Falimbani, Khatib Minangkabawi, Nawawi al Bantani, Muhammad Arsyad al-Banjari, dan masih banyak lagi.[14]

Contoh kongkrit tersebut, hanyalah segelintir tokoh pelaksana lembaga pendidikan Islam, sehingga dengan demikian, kehadiran dan eksistensi lembaga pendidikan Islam tersebut adalah modal yang dapat dijadikan bahan bagi pelaksanaan dan pengembangan lembaga Negera yang bertugas untuk mencetak kader bangsa yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga dengan demikian, Negara menjadi lebih baik.

Sejarah Islam yang sudah berjalan lebih dari lima belas abad lamanya telah memberikan kontribusi dan meninggalkan napak tilas kesejarahan yang mampu dijadikan potret wajah kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, sejarah bukan hanya menggambarkan realitas kanyataan yang telah terjadi dimasa yang sebelumnya, melainkan juga

[14] Figur alumni pesantren dan Timur-Tengah ini telah melahirkan karya-karya besar di bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Citra intelektual dan ekspansi karya figur tersebut bukan hanya sebatas taraf domestik saja, tetapi juga diakui di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi sebagai pemandu bagi generasi yang selanjutnya, agar mereka mampu untuk menjadikan pijakan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pendidikan Islam di Indonesia, pada dasarnya telah terbentuk seiring dengan datanganya Agama Islam di bumi nusantara ini, karena salah satu penyebaran Islam di negeri ini adalah salah satunya melalui dunia pendidikan, disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan dengan para putri penguasa atau para raja. Peran dan kiprah pendidikan Islam dalam merebut dan menyatukan bumi nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia tentunya sangatlah banyak. Tidak hanya sampai disitu, kiprah pendidikan Islam dalam mengisi kemerdekaan ini juga masih tetap menunjukkan peranannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbasyi (al), Athiyah. *Dasar-dasar Pokok Pemikiran Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ahmadi, Abu., dan Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Amri, Sofan. *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 201*3. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.

Arikonto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran Secara Manusia*. Bandung: Rineka Cipta, 1993.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Buku Pintar Homeschooling.* Jogjakarta: Flashbooks, 2012.

Basah, Sjacrhan. *Ilmu Negara -Pengantar,Metode dan Sejarah Perkembangan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Bisri (al), Abid., Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Boediono. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Buchori, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Bukhori, M. *Teknik Evaluasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Jermars, 1986.

Chultsum, Umi., Windy Novita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kasiko, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam- dalam Sistem Pendidikan Nasonal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Doll, Ronald. C. *Curriculum Improvement, Decision Making and Process*. Boston: Alyyn and Bacon, 1994.

Echols, Jhon. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996, Cet. XXIII.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Fayumi, Badriyah dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.

Hamim, Nur. *Bahan Ajar PLPG Sertifikasi Guru/Pengawas dalam Jabatan*. Surabaya: LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Hamim, Nur. *Diklat Profesi Guru: Bahan Ajar PLPG Sertifikasi Guru/Pengawas dalam Jabatan*. Surabaya: LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 2009.

Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Permadani, 2004.

J.I.G.M.Drest. *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik?*Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Kemenag RI. Peraturan Kemenag Kurikulum 2013 Nomor 000912 Tahun 2013. 8.

Kemendikbud. *Implementasi Kurikulum 2013*. Pondok Cabe: Pess Workshop, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kunandar. *Penilaian Autentik Kurikulum 2013*. Jakarta: Raja Grafindo.

Maksum. *Madrasah*; *Sejarah dan Perkembangannya.* Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.

Mudzakir, Ahmad. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Mufidah, Ch. *Bingkai Sosial Gender : Islam, Strukturasi, dan Kontruksi Sosial*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Mulyasa, E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Mulyoto. *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulm 2013*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2013.

Nasution, S. *Kurikulum dan Pengajaran.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.

Negoro, Sutratina Tirto. *Anak Super Normal dan Problem Pendidikannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Nugroho, Rianto. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2008.

Nuh, Muhammad. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Kelas IV*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001.

Romli, Moch. *Manajemen Pembelajaran di Sekolah Dasar Full Day School*. Disertasi---UM Malang, 2004.

Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sehudin. *Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Full Day School Terhadap Akhlak Siswa*. Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2005.

Setyosari. *Model Pembelajaran Konstruktivistik; Sumber Belajar; Kajian Teori dan Aplikasinya*. Malang: LP3UM, 2001.

Simbolon, P. *Homeschooling: Sebuah Pendidikan Alternatif* (www.wordpress.com, diakses 08 Mei 2017

Soedijarto. *Landasan dan Arahan Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas Media, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20; Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.

Sumardiono. *Homescooling, Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

Sumbulah, Umi. *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang : UIN Maliki Press, 2008.

Suryadi., Ace dan Tilaar, H.A.R. *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Susanto, Edi. "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan". *Tadris; Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 4 No.1, 2009.

Swift, D. R. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bhratara 1989.

Syarif, Ahmad. *Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah*. Bandung: Citra Umbara, 1995.

Syatibi, Rahmat Raharjo. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Yogyakarta: Azzagrafika, 2013.

Tim penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Blaipustaka, 2000.

Tirtarahardja, Umar., & Sasula, La. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Wahjoetomo. *Pesantren.* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widyawati, Wiwin. *Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar*. Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2002.

Wingkel, W.S. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia, 1984.

Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

http://anan-nur.blogspot.com/2011/01/sistem-pendidikan-nasional-realisasi.html. Diakses pada 02 Mei 2017.

Http://Bernaldoyudhawidyantoko.Blogspot.Com/2011/10/. Diakses pada 10 Januari 2017.

Http//Izzatyalmuhyi.blogspot.com. Diakses pada tanggal 11 Februari 2017.

http://jawala.blogspot.com/2009/03/penerapan-*homeschooling*-di-sekolah.html, diakses pada 09 Mei 2017

http://www.academia.edu/7435602/makalah_pemikiran_pendidikan_kontemporer_gender_dalam_pendidikan. diakses pada 7 mei 2017.

http://www.Psikologizone.com/pengertian-*homeschooling*-Indonesia / 06511347 diakses pada 27 Mei 2017

http://www.wds.worldbank.org/external/default/wdscontentserver/wdsp/ib/2013/08/22/000442464_20130822114553/rendered/pdf/730310revised00sa0gender0brief030bh.pdf . Diakses pada 7 mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

POLITIK PENDIDIKAN

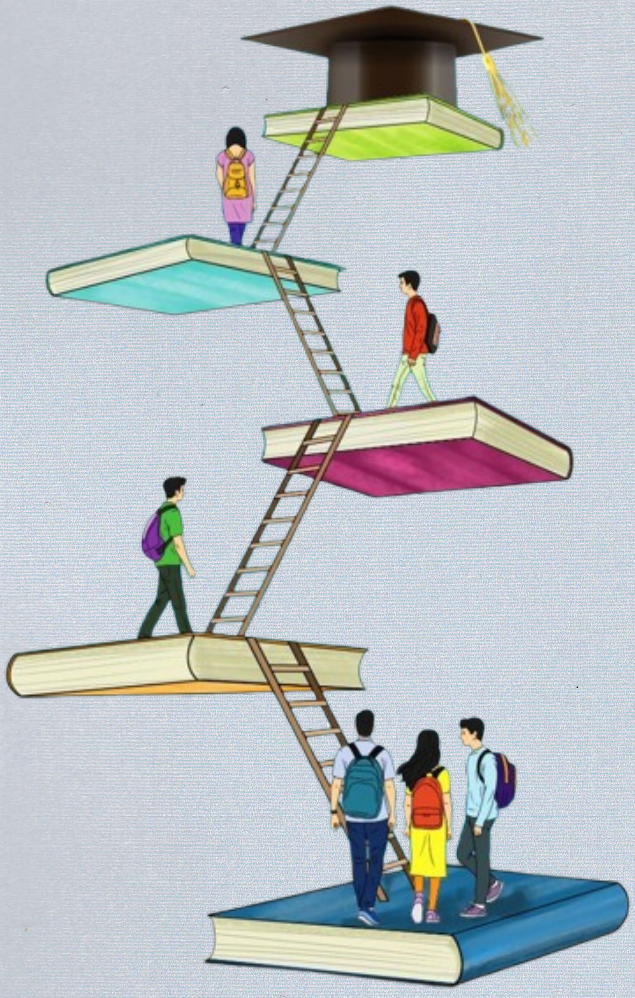

ISBN : 978-602-6604-39-2

9 786026 604392

DWIPUTRA PUSTAKA JAYA

Star Safira Cluster Nizar Mansion E4/14

Taman - Sidoarjo